



Semangat Kolaborasi dalam Kepemimpinan BPK di INTOSAI 2028

BPK JUGA TENGAH MENYIAPKAN BERBAGAI SUMBER DAYA
UNTUK MENYAMBUT HAJATAN TERBESAR SAI DI SELURUH DUNIA TERSEBUT.



9

Mewujudkan
Akses Air
Minum Layak
dan Aman

19

BPK akan
Tindak Lanjuti
Pertemuan dengan
SAI Thailand

36

Ketua BPK:
Akuntabilitas
adalah Pondasi
Utama



PENGARAH

Isma Yatun
Hendra Susanto
Nyoman Adhi Suryadnyana
Daniel Lumban Tobing
Achsanul Qosasi
Haerul Saleh
Ahmadi Noor Supit
Pius Lustrilanang
Slamet Edy Purnomo

PENANGGUNG JAWAB

Bahtiar Arif

WAKIL PENANGGUNG JAWAB

R. Yudi Ramdan Budiman

KETUA TIM REDAKSI

Sri Haryati

KEPALA SEKRETARIAT

Bestantia Indraswati

SEKRETARIAT

Fitri Yuliantri Permana
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Apriyana
Sudarman

ALAMAT SEKRETARIAT

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Email: wartapemeriksa@bpk.go.id
www.bpk.go.id

DITERBITKAN OLEH

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya daripihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

Kolaborasi di antara *supreme audit institutions* (SAI) menjadi hal yang ditekankan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun. Hal tersebut disampaikannya seiring dengan terpilihnya BPK menjadi tuan rumah INCOSAI XXVI tahun 2028 sekaligus Ketua INTOSAI 2028-2031.

"Dengan berkolaborasi menuju tujuan bersama melalui upaya di antara SAI dan *stakeholder*, kita bisa memperkuat hubungan dalam komunitas global untuk berkontribusi terhadap masa depan masyarakat dan bumi yang lebih baik," ungkap Isma.

Isu tersebut menjadi salah satu laporan utama yang redaksi siapkan dalam edisi September 2023 ini. INTOSAI merupakan organisasi lembaga pemeriksa negara-negara sedunia yang bersifat otonom, independen, dan non-politis yang bertujuan mendorong tata kelola sektor publik dengan memperkuat peranan lembaga pemeriksa untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah yang transparan, akuntabel, dan kredibel serta memberikan manfaat bagi publik di masing-masing negara.

Selain laporan tersebut, redaksi juga menyiapkan informasi mengenai upaya transformasi digital yang dilakukan BPK. Hal ini sesuai dengan Renstra 2020-2024 BPK, yaitu untuk menuju *digital by default*.

Secara sederhana *digital by default* dapat diartikan bahwa semua aktivitas pegawai diharapkan berjalan di atas platform digital. Tidak hanya dalam proses pemeriksaan, namun juga nonpemeriksaan.

Nikmati juga bedah buku yang redaksi siapkan di *Warta Pemeriksa* edisi kali ini. Kali ini, buku yang dibedah berjudul *Invisible Woman* karya Caroline Criado Perez. Dalam buku ini, Caroline secara gamblang mengungkapkan seringnya wanita diabaikan dalam berbagai penelitian.

Simak juga wawancara redaksi dengan Menteri PAN-RB Azwar Anas mengenai reformasi birokrasi. Menurutnya, reformasi birokrasi tidak boleh terjebak dalam rutinitas. Tidak boleh panjang dan bertele-tele, namun harus cepat dan tepat.

Yang tidak kalah menarik adalah informasi mengenai kesehatan. Kali ini, redaksi membahas mengenai pentingnya bersikap asertif dalam berkomunikasi.

Masih banyak informasi lain yang redaksi siapkan dalam edisi September ini. Selamat menikmati. ~



4 >> Semangat Kolaborasi dalam Kepemimpinan BPK di INTOSAI 2028

BPK juga tengah menyiapkan berbagai sumber daya untuk menyambut hajatan terbesar SAI di seluruh dunia tersebut.



6 >> Kenal Lebih Dekat dengan INTOSAI

Kongres INTOSAI akan diadakan setiap tiga tahun sekali.



9 >> Mewujudkan Akses Air Minum Layak dan Aman

Pemerintah belum sepenuhnya dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman.

- 12 >> Mengawal Penyediaan Tenaga Listrik yang Berkelanjutan
- 14 >> Menuju *Digital By Default*
- 19 >> BPK akan Tindak Lanjuti Pertemuan dengan SAI Thailand
- 21 >> Wakil Ketua BPK Bicara soal BIDICS di Kairo
- 22 >> Dunia yang Didesain dan Ditentukan oleh Keputusan Pria
- 26 >> Terus Sederhanakan Proses Bisnis
- 29 >> Pentingnya Bersikap Asertif dalam Berkomunikasi
- 31 >> Membudayakan Olahraga
- 34 >> BPK Minta Kementerian BUMN Perhatikan Permasalahan yang Ditemukan
- 36 >> Ketua BPK: Akuntabilitas adalah Pondasi Utama
- 38 >> BPK akan Lakukan Pemeriksaan Terhadap 4 DOB
- 40 >> Standar Kompetensi Bagi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SDM PBJP)
- 48 >> Berita Foto

THE 59th ASOSAI GOVERNING BOARD MEETING

Busan, Republic of Korea, 21-22 September 2023



Semangat Kolaborasi dalam Kepemimpinan BPK di INTOSAI 2028

BPK JUGA TENGAH MENYIAPKAN BERBAGAI SUMBER DAYA UNTUK MENYAMBUT HAJATAN TERBESAR SAI DI SELURUH DUNIA TERSEBUT.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan pentingnya kolaborasi di antara Supreme Audit Institution (SAI) dan pemangku kepentingan guna mencapai masa depan yang lebih baik untuk masyarakat dan lingkungan. Pesan tersebut disampaikan seiring dengan terpilihnya BPK menjadi Tuan Rumah INCOSAI XXVI Tahun 2028 sekaligus Ketua INTOSAI 2028-2031. Hal itu diputuskan dalam Pertemuan ke-59 Pengurus Organisasi Lembaga Pemeriksa se-Asia atau Governing Board of Asian Organization of Supreme Audit Institutions (GB ASOSAI) di Busan, Korea Selatan pada 20-22 September 2023.

"Dengan kolaborasi menuju tujuan bersama melalui *sharing* dan *caring* antara SAI dan *stakeholder*, kita bisa memperkuat hubungan dalam komunitas global untuk berkontribusi terhadap terciptanya masa depan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik," ungkap Isma.

Hasil Pertemuan ke-59 GB ASOSAI tersebut akan disahkan pada ASOSAI Assembly ke-16 di India Tahun 2024. Keketuaan BPK pada organisasi lembaga pemeriksa sedunia tersebut merupakan yang pertama kali sejak INTOSAI didirikan tahun 1953.

INTOSAI merupakan organisasi lembaga pemeriksa negara-negara sedunia yang bersifat otonom, independen, dan non-politis yang bertujuan mendorong tata kelola sektor publik dengan memperkuat peranan lembaga pemeriksa untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah yang transparan, akuntabel dan kredibel serta memberikan manfaat bagi publik di masing-masing negara.

Saat ini, INTOSAI memiliki 195 anggota penuh (*full member*), 5 anggota rekanan (*associate member*), dan 2 anggota terafiliasi (*affiliate member*). BPK menjadi anggota penuh INTOSAI sejak 1968. Keketuaan 2022-2025 saat ini dipegang oleh regional Amerika (SAI Brasil), dan keketuaan 2025-2028 oleh regional Afrika (SAI Mesir).

PERJALANAN MENUJU KEKETUAAN INTOSAI

Persiapan BPK untuk menjadi ketua INTOSAI sudah dilaksanakan sejak 2019. Saat itu, ketua INTOSAI adalah SAI Rusia. Kemudian, kepemimpinan dilanjutkan oleh kawasan Amerika Latin yakni oleh SAI Brasil. Dari Brasil, estafet kepemimpinan akan berlanjut ke kawasan Afrika dengan SAI Mesir yang akan menjadi ketua INTOSAI pada 2025-2028. Indonesia, melalui BPK, terpilih dalam pertemuan GB ASOSAI di Busan, Korea Selatan untuk menjadi ketua INTOSAI di periode kepemimpinan Asia pada 2028-2031.

Dengan kolaborasi dan sinergi BPK dengan Kementerian dan Lembaga lain, BPK berhasil menjadi pemimpin lembaga pemeriksa negara-negara sedunia tersebut. BPK juga telah menorehkan berbagai prestasi di level internasional. Beberapa di antaranya adalah menjadi pemeriksa eksternal di organisasi internasional. BPK juga sukses menginisiasi terbentuknya SAI20 sebagai bagian dari Presidensi Indonesia di G20 pada 2022. Pada tahun 2014-2019, BPK juga merupakan Ketua dan Sekretariat dari INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA) yang beranggotakan 77 negara.

Selain nama BPK yang sudah semakin mengglobal, upaya diplomasi dengan berbagai negara anggota ASOSAI turut dilakukan untuk menyukseskan pencapaian keketuaan BPK di INTOSAI tersebut.

Seiring dengan keketuaan Indonesia, maka BPK akan mulai terlibat aktif dengan menjadi wakil ketua INTOSAI pada 2025. Kini, BPK tengah menyiapkan tema substansi yang akan diusung dalam periode keketuaannya.

Dengan kolaborasi menuju tujuan bersama melalui *sharing* dan *caring* antara SAI dan stakeholder, kita bisa memperkuat hubungan dalam komunitas global untuk berkontribusi terhadap terciptanya masa depan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik.



■ Ketua BPK Isma Yatun dalam Pertemuan ke-59 Pengurus Organisasi Lembaga Pemeriksa se-Asia atau Governing Board of Asian Organization of Supreme Audit Institutions (GB ASOSAI) di Busan, Korea Selatan.

Selain itu, BPK juga tengah menyiapkan berbagai sumber daya untuk menyambut hajatan terbesar SAI di seluruh dunia tersebut. Persiapan akan melibatkan kerja lintas satuan kerja (satker), baik terkait substansi maupun penyelenggaraan acaranya.

BPK berkomitmen memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang ada baik dari sisi kualitas dan kuantitas. Beberapa kualifikasi yang diperkuat salah satunya terkait komunikasi dan diplomasi hubungan internasional. Tak hanya itu, SDM yang memahami teknis pemeriksaan juga akan diperkuat untuk bisa merancang substansi yang diperlukan dalam kepemimpinan BPK di INTOSAI pada periode tersebut. ~

Kenal Lebih Dekat dengan **INTOSAI**

**KONGRES INTOSAI
AKAN DIADAKAN SETIAP
TIGA TAHUN SEKALI.**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah terpilih menjadi Tuan Rumah INCOSAI XXVI Tahun 2028 sekaligus Ketua INTOSAI 2028-2031. Sebagai organisasi lembaga pemeriksa sedunia, INTOSAI memiliki sejarah panjang yang bermula pada November 1953. Kala itu, Supreme Audit Institution (SAI) Kuba mengundang para pimpinan SAI dari negara-negara seluruh dunia untuk menghadiri suatu pertemuan di Havana, Kuba. Dasar pemikiran penyelenggaraan pertemuan ini adalah adanya kesadaran penuh tentang perlunya pengembangan SAI dan penguatan hubungan kerjasama antara SAI di seluruh dunia. Pertemuan ini dihadiri oleh delegasi SAI 34 negara anggota PBB.

Pertemuan di Havana, Kuba ini telah membuka jalan bagi pendirian INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) dengan moto "*experientia mutua omnibus prodest*" yang artinya "pengalaman bersama bermanfaat bagi kita semua". Pertemuan ini disebut juga sebagai Kongres INTOSAI yang pertama. Dr. Emilio Fernandez Camus, Ketua SAI Kuba, terpilih sebagai Ketua INTOSAI yang pertama dan Kantor SAI Kuba sebagai kantor pertama Sekretariat INTOSAI. Selain itu, diputuskan juga bahwa Kongres INTOSAI akan diadakan setiap tiga tahun sekali.

Pada tahun 1960, SAI Kuba secara resmi melepaskan perannya sebagai Sekretariat INTOSAI, SAI Austria kemudian mengambil alih fungsi sekretariat INTOSAI dan melanjutkan kegiatan utama mempromosikan bidang pemeriksaan keuangan negara dan pengendalian manajemennya.

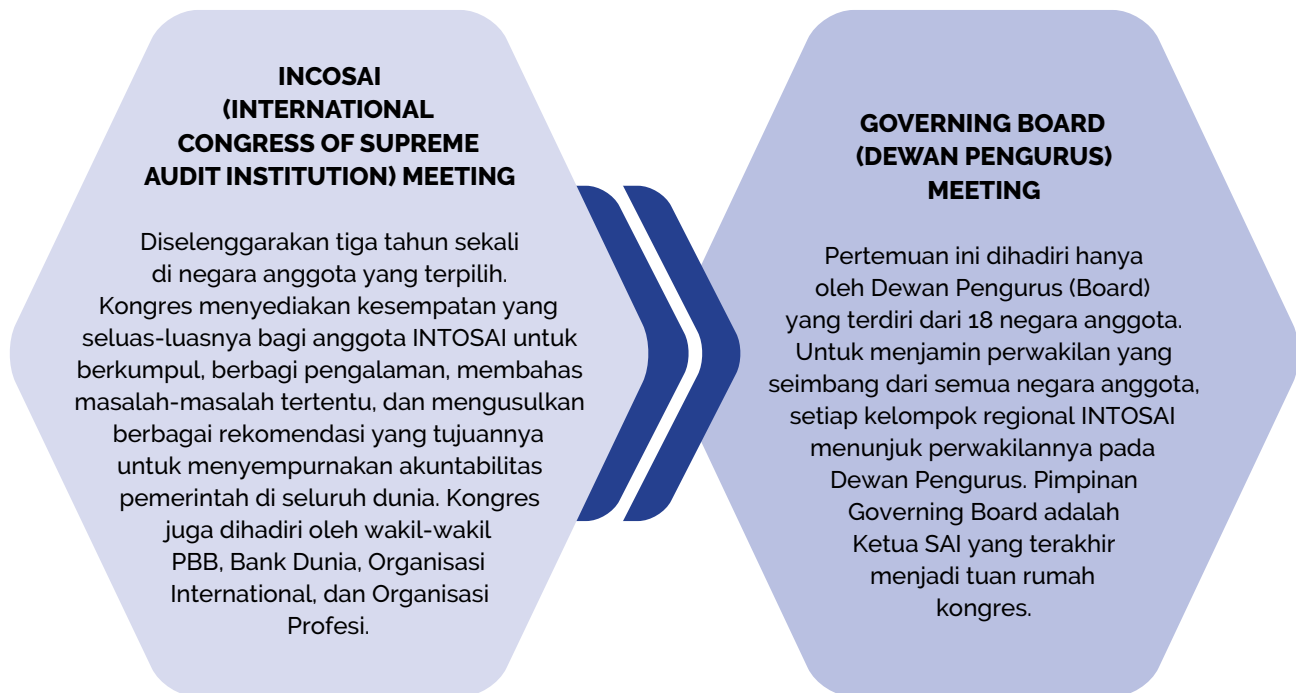


Pada Kongres INTOSAI keenam di Tokyo Jepang tahun 1968 disahkan INTOSAI Standing Orders (semacam anggaran dasar) dan SAI Austria secara resmi ditetapkan sebagai Sekretariat Tetap INTOSAI. Selain itu, ditetapkan juga bahwa INTOSAI merupakan satu-satunya organisasi permanen SAI-SAI dari negara-negara anggota PBB. Pada Kongres INTOSAI kedelapan di Madrid, Spanyol tahun 1974, nama sekretariat internasional INTOSAI diganti menjadi Sekretariat Jenderal INTOSAI.

SAI suatu negara diharapkan dapat bekerjasama dengan INTOSAI agar pandangan SAI tersebut menjadi lebih luas sampai di luar jangkauan nasionalnya dan dapat memperkaya pengalaman yang diperolehnya. Oleh karena itu, INTOSAI mengarahkan kegiatannya kepada upaya memperkuat hubungan kerja sama antar SAI. Hal ini dilakukan melalui mempromosikan pertukaran pandangan, pemikiran dan pengalaman di bidang pemeriksaan keuangan negara.

Kapan BPK mulai masuk dalam keanggotaan INTOSAI? Jawabannya, pada Kongres INTOSAI keenam di Tokyo, tanggal 22 Mei 1968. BPK disahkan oleh Governing Board menjadi anggota penuh INTOSAI. Pengesahan keanggotaan BPK tersebut dihadiri oleh Ketua BPK, D. Suprajogi dan Sekretaris Jenderal BPK, Muljatno Sindhudarmoko.

Sebagian besar kegiatan teknis INTOSAI dilaksanakan oleh Komite, Working Groups dan Task Force. Kegiatan rutin utama INTOSAI adalah sebagai berikut:



Sementara itu, kegiatan teknis yang dilakukan oleh Komite, Working Groups, Task Force, Sub-Committee dan Project Groups adalah sebagai berikut:

- ▶ Komite membahas mengenai isu-isu yang menarik bagi semua anggota INTOSAI. Misalnya menyusun standar dan *guidelines* untuk audit pemerintahan yang dapat diaplikasikan oleh semua anggota.
- ▶ Working Groups dibentuk sebagai hasil dari tema INCOSAI dan rekomendasi dari SAI-SAI atas isu-isu yang spesifik, misalnya audit lingkungan atau *privatization*. Sebagai hasilnya, Working Group menerbitkan petunjuk dan *best-practice* yang spesifik.
- ▶ Task Force dibentuk oleh Kongres atau Governing Board karena adanya isu-isu signifikan yang menarik minat anggota. Task Force dibentuk untuk jangka waktu tertentu dan dibubarkan setelah kegiatan selesai.
- ▶ Sub-Committee dibentuk untuk menangani isu terkait prinsip-prinsip audit misalnya terkait audit keuangan, *compliance*, maupun kinerja.
- ▶ Project Groups menangani isu terkait pengembangan atau penguatan kapasitas SAI seperti terkait SAI PMF.

Sejak berdiri pada tahun 1953 sampai dengan tahun 2017, INTOSAI telah menyelenggarakan 22 kali Kongres. Penyelenggaraannya dilakukan di berbagai negara anggota secara bergiliran. Setiap kongres melakukan pembahasan mengenai pengembangan organisasi dan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan pemeriksaan keuangan negara. Kongres INTOSAI ini dilakukan setiap tiga tahun sekali. ~



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Budaya ASN BerAKHLAK

Dalam rangka untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar (core values) bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menetapkan Core Values BerAKHLAK yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.



Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan



Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif



Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif

01

Berorientasi Pelayanan



- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti

02

Kompeten



- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

03

04

Loyal



- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

05

06

Kolaboratif



- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

06



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri

Mewujudkan Akses Air Minum Layak dan Aman

**PEMERINTAH BELUM SEPENUHNYA DAPAT
MERUMUSKAN KEBIJAKAN YANG TEPAT UNTUK
MENDORONG PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM
DAN SANITASI LAYAK DAN AMAN.**

Pada semester II 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan prioritas nasional (PN) terkait penguatan infrastruktur. Salah satunya terkait penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, arah kebijakan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar untuk perumahan dan permukiman antara lain penyediaan infrastruktur dasar permukiman termasuk air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan pengelolaan sampah). Kemudian, penyediaan akses air minum aman yang difokuskan pada rencana pengamanan dan pengawasan kualitas air minum, penyediaan akses sanitasi aman yang berfokus kepada pengembangan sambungan rumah yang terhubung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD), serta penyediaan akses pengelolaan persampahan.

Selain itu, peningkatan ketersediaan akses air minum jaringan perpipaan yang difokuskan pada optimalisasi kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang sudah terpasang dan penyediaan akses air minum untuk daerah kepulauan, kawasan perbatasan, daerah rawan air, dan daerah prioritas nasional lainnya. Kebijakan lainnya yakni percepatan penyediaan akses air minum dan sanitasi aman dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penguatan kapasitas pemda serta penyelenggara air minum dan sanitasi, baik dari sisi perencanaan, teknis dan strategi pendanaan.

Salah satu agenda RPJMN 2020–2024 adalah penyediaan akses air minum yang layak dan aman dengan target sampai dengan tahun 2024 sebesar 100 persen penduduk telah mengakses air minum layak, sebanyak 30 persen penduduk telah mengakses air minum perpipaan, dan sebanyak 15 persen penduduk telah mengakses air minum aman. Hal tersebut juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) keenam yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Untuk mendorong pelaksanaan agenda pembangunan nasional tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah dalam penyediaan akses air minum yang layak dan aman pada sejumlah objek pemeriksaan (obrik) termasuk di antaranya dua obrik pemerintah pusat yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

BPK mencatat, Kemenkes dan Kemendagri telah melakukan sejumlah upaya. Hal itu yakni Kemenkes telah mendukung perencanaan, pemenuhan, dan pendayagunaan tenaga sanitasi lingkungan melalui penugasan khusus tenaga kesehatan melalui Program Nusantara Sehat. Selain itu, Kemenkes telah mengusulkan alokasi anggaran dan menetapkan menu kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan dan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan untuk kegiatan pengawasan kualitas air minum dan penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bagi pemda dalam petunjuk teknis.



SAPRUDDIN

Kemudian, penetapan regulasi di bidang perencanaan anggaran daerah sebanyak empat regulasi di tahun 2021 (200 persen dari target), penetapan regulasi di bidang pengelolaan BUMD, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah (BMD) sebanyak 2 regulasi di tahun 2021 (100 persen dari target), penetapan regulasi di bidang penyusunan rencana kerja pemda sebanyak satu regulasi di tahun 2021 (100 persen dari target) dan sebanyak satu regulasi di tahun 2022 (100 persen dari target), serta penetapan regulasi tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Meski demikian, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sejumlah temuan yang memuat permasalahan antara lain Kemenkes belum menyusun regulasi dan kebijakan teknis terkait pengawasan kualitas air minum secara memadai, di mana regulasi dan kebijakan teknis yang ditetapkan belum selaras dengan peraturan lainnya dan belum sepenuhnya disusun secara lengkap dan jelas. Akibatnya, terjadi ketidakseragaman dalam pelaksanaan dan pelaporan data capaian pengawasan kualitas air minum.

Kemenkes juga belum memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan STBM pilar 1 stop buang air besar sembarangan secara memadai, yaitu dalam melakukan evaluasi melalui analisis data dan informasi capaian desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan yang disampaikan oleh seluruh provinsi. Akibatnya, terdapat potensi kesalahan dalam mengambil kebijakan atas hasil analisis menggunakan data yang tidak valid.

Kemudian, di lingkup Kemendagri, basis data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum dan sanitasi belum lengkap dan andal. Basis data BUMD air minum yang belum menerapkan *full cost recovery* (FCR) dan/atau memiliki *idle capacity* belum dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu agenda RPJMN 2020–2024 adalah penyediaan akses air minum yang layak dan aman dengan target sampai dengan tahun 2024 sebesar 100 persen penduduk telah mengakses air minum layak, sebanyak 30 persen penduduk telah mengakses air minum perpipaan, dan sebanyak 15 persen penduduk telah mengakses air minum aman.

Akibatnya, pemerintah belum sepenuhnya dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendorong penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman. Hal itu antara lain Kementerian Keuangan belum dapat mengalokasikan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) *Specific Grant* untuk bidang pekerjaan umum berdasarkan data SPM untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar SPM. Selain itu, Kemendagri juga belum sepenuhnya dapat merancang prioritas pembinaan kepada pemda dalam perencanaan dan penganggaran pemenuhan kebutuhan SPM serta kepada BUMD air minum dan air limbah/sanitasi dalam peningkatan kinerja dan cakupan layanan.

Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) tentang tata cara penyelarasan RPJMD/RKPD dengan RPJMN/RKP serta Pedoman Penyusunan RKPD belum diatur secara lengkap dan jelas. Akibatnya, target program prioritas nasional terkait penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman berpotensi tidak tercapai.

NSPK tentang desain pembinaan terhadap pemerintah desa dan kelompok masyarakat pascaprogram Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) belum ditetapkan secara lengkap. Akibatnya, pengelolaan aset Pamsimas dan kelembagaan pascaprogram Pamsimas berpotensi tidak berkelanjutan untuk mendukung pencapaian target RPJMN dan TPB.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendorong penyelesaian rancangan Permenkes sebagai peraturan pelaksanaan PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan yang meliputi kewajiban pemda untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan kualitas air minum, sanksi bagi penyelenggara air minum, serta koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan kualitas air minum.

Merevisi Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 terkait mekanisme pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi capaian STBM yang memuat tahapan pelaporan per jenjang, pihak yang terlibat dalam pelaporan, tanggung jawab dan kewenangan validasi data, dan periode pelaporan.

Sementara itu, rekomendasi BPK untuk Menteri Dalam Negeri yakni menginstruksikan unit kerja eselon I terkait penyediaan akses air minum dan sanitasi/air limbah untuk lebih optimal dalam melakukan koordinasi.

Mendagri juga perlu menginstruksikan Dirjen Bina Bangsa untuk menetapkan NSPK tentang tata cara fasilitasi rancangan perkada tentang RKPD dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menetapkan NSPK yang mengatur tentang tata cara penyelarasan antara RPJMD/RKPD dengan RPJMN/RKP serta nomenklatur dan kodifikasi kegiatan dan subkegiatan untuk mendukung pencapaian indikator air minum aman.

Dirjen Bina Pemdes juga perlu berkoordinasi dengan K/L terkait dalam menetapkan NSPK yang mengatur tentang pembinaan pascaprogram Pamsimas secara lengkap antara lain percepatan capaian target air minum dan sanitasi layak dan aman di desa serta tata kelola aset hasil program Pamsimas dan kelembagaan penyelenggara SPAMS berbentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa. ~

Mengawal Penyediaan Tenaga Listrik yang Berkelanjutan

DANA KOMPENSASI
TENAGA LISTRIK TAHUN
2021 DIPERHITUNGKAN DAN
DIBAYARKAN LEBIH BESAR
RP675,98 MILIAR.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas penyediaan tenaga listrik dan tarif tenaga listrik pada satu objek pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2022, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya BPK mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ketujuh yakni menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan sesuai dengan Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, arah kebijakan pembangunan energi dan ketenagalistrikan mencakup antara lain memberikan subsidi dan stimulus tarif listrik untuk meringankan beban kelompok masyarakat tidak mampu dan rentan serta membangun infrastruktur ketenagalistrikan, terutama energi terbarukan dan konservasi energi, termasuk untuk mendukung penuntasan elektrifikasi rumah tangga.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PT PLN, adalah BUMN yang menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Tujuan PT PLN adalah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan. PT PLN menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik, antara lain kegiatan pembangkitan, penyaluran, dan distribusi, melakukan perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik, dan pengembangan penyediaan tenaga listrik.



Penyesuaian tarif tenaga listrik tahun 2021 terhadap 13 golongan tarif pelanggan nonsubsidi tidak disetujui Menteri ESDM, sehingga dana kompensasi membebani keuangan negara sebesar Rp24,59 triliun.

Tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT PLN ditetapkan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020. Sesuai Permen ESDM tersebut ditetapkan sebanyak 25 golongan tarif merupakan kelompok pelanggan/golongan tarif bersubsidi yang memperoleh kompensasi melalui subsidi listrik dari pemerintah jika tarif yang ditetapkan pemerintah lebih kecil dari biaya pokok untuk menghasilkan listrik yang dikeluarkan oleh PLN. Sedangkan untuk golongan tarif tertentu yaitu 13 golongan tarif yang tidak termasuk dalam golongan tarif subsidi diberlakukan penyesuaian tarif tenaga listrik. Apabila terdapat kekurangan penerimaan PT PLN akibat selisih neto antara tarif tenaga listrik nonsubsidi berdasarkan perhitungan formula penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penetapan tarif tenaga listrik nonsubsidi oleh pemerintah maka PT PLN dapat memperoleh dana kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah.

Dari pemeriksaan tersebut, BPK mengungkapkan temuan yang memuat permasalahan yakni penyesuaian tarif tenaga listrik tahun 2021 terhadap 13 golongan tarif pelanggan nonsubsidi tidak disetujui Menteri

ESDM, sehingga dana kompensasi membebani keuangan negara sebesar Rp24,59 triliun.

Selain itu, dana kompensasi tenaga listrik tahun 2021 diperhitungkan dan dibayarkan lebih besar Rp675,98 miliar. Permasalahan tersebut mengakibatkan belanja dalam APBN tahun 2022 direalisasikan dalam bentuk dana kompensasi untuk membiayai konsumsi tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi PT PLN atau pelanggan yang mampu, dan kelebihan pembayaran dana kompensasi tenaga listrik tahun 2021 oleh pemerintah kepada PT PLN sebesar Rp675,98 miliar.

Kemudian, perhitungan harga patokan batu bara (HPB) dalam penyesuaian tarif belum selaras dengan perhitungan harga jual batu bara transaksi berjangka yang telah berlangsung di PT PLN. Kondisi tersebut mengakibatkan HPB yang digunakan dalam perhitungan penyesuaian tarif tahun 2021 berpotensi kurang akurat.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PLN agar berkoordinasi lebih optimal dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan untuk menyusun pemberlakuan formula penyesuaian tarif yang wajar atas golongan tarif nonsubsidi, serta menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp675,98 miliar atau mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan agar kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam pembayaran dana kompensasi tenaga listrik tahun berikutnya.

Direksi PLN juga perlu mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM untuk mempertegas ketentuan perhitungan HPB dalam perhitungan penyesuaian tarif sebagai pedoman bagi PT PLN dalam melaksanakan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. ~

Menuju *DIGITAL* *BY DEFAULT*

SEMUA AKTIVITAS PEGAWAI DIHARAPKAN BERJALAN DI ATAS PLATFORM DIGITAL. TIDAK HANYA DALAM PROSES PEMERIKSAAN, NAMUN JUGA NONPEMERIKSAAN.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus melakukan transformasi, termasuk dalam hal teknologi digital. Transformasi digital sesuai dengan amanat Rencana Strategis 2020 BPK 2020-2024.

"Bahwa sesuai Renstra 2020-2024, BPK melaksanakan transformasi digital untuk menuju *digital by default*," ungkap Kabag Pengembangan Sistem Informasi Biro Teknologi Informasi BPK Rudi Hermawan dalam kegiatan Knowledge Transfer Forum, belum lama ini.

Lalu, apa arti dari *digital by default*? Menurut Rudi, secara sederhana *digital by default* dapat diartikan bahwa semua aktivitas pegawai diharapkan berjalan di atas platform digital. Tidak hanya dalam proses pemeriksaan, namun juga nonpemeriksaan.

Dalam menjalankan proses ini, Biro Teknologi Informasi bekerja sama dengan seluruh satuan kerja di BPK untuk mengimplementasikan transformasi digital. Biro IT memiliki beberapa tahap dalam proses transformasi digital menuju *digital by default*.

Tahapan Transformasi Digital BPK

- 1 Kerangka transformasi digital
- 2 Kerangka rencana induk TIK
- 3 Kerangka *digital by default*
- 4 Arsitektur aplikasi
- 5 Sistem informasi pemeriksaan
- 6 Inovasi TI
- 7 IT *security awareness*



Terkait kerangka transformasi digital, Biro TI sesuai dengan amanat renstra, mengejawantahkan hal tersebut lewat RINTIK atau Rencana Induk TIK BPK. "Landasan kita tetap dalam RINTIK sama, kita tetap memegang nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas dan profesionalisme," tutur dia.

Kerangka tranformasi digital BPK memiliki visi dan misi, yaitu visi menjadikan data dan informasi sebagai penggerak lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata Kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Sementara, misinya adalah mendorong penerapan transformasi digital pada seluruh proses bisnis BPK.

Setelah itu dilakukan penerapan tata Kelola TI dan tata Kelola data yang mencakup berbagai aspek pengendalian secara transparan dan konsisten. Sedangkan terakhir yaitu pemanfaatan *big data analytics* dalam kegiatan pemeriksaan BPK.

"Tidak hanya di pemeriksaan, namun juga di nonpemeriksaan juga di pemeriksa," kata dia.

Kerangka ini memiliki tujuan strategis yaitu untuk meningkatkan manfaat hasil analisis data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. "Kami ingin menjadi data dan informasi sebagai penggerak dari visi dan misi BPK," ucap dia.

DIGITAL BY DEFAULT

Dalam proses transformasi, menurut dia, Biro TI BPK sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang baru namun menjalankan sesuai rancangan yang sudah ada dan dijalankan sesuai aktivitas teknologi informasi. Sesuai rancangannya, data atau kegiatan pemeriksaan menggunakan aplikasi pemeriksaan, seperti SMIP, SMART, PRISMA dan lain sebagainya.

"Artinya ketika menggunakan aplikasi kelembagaan maka akan tersimpan. Selain itu kami juga menggunakan data yang berasal dari one webs dan one apps yang bernama BPK Go," ucap dia.

Data-data itu lalu dikumpulkan menjadi Digital Support Systems, dimana harapannya ke depan pengambilan keputusan murni berdasarkan data. "Bila ini semua dilakukan maka kita akan menjadi *digital by default*," papar dia.

Adapun mengenai rancangan sistem informasi di BPK, Rudi menjelaskan terdapat tiga bentuk, yaitu pemeriksaan, pendukung pemeriksaan dan e-stakeholders. Dalam sistem pemeriksaan, ada beberapa aplikasi yaitu sistem manajemen pemeriksaan, contohnya SIAP, Portal Covid, dan Monitoring Pemeriksaan.

Kemudian, ada sistem manajemen reviu ITAMA atau WASMA. Selain itu ada pula, Sistem Pemeriksaan Investigasi dengan aplikasi Catch-Inquiry.

Untuk pendukung pemeriksaan, ada aplikasi SIPTL, SIKAD, SIKAP dan SMART. "Saat ini untuk aplikasi SIKAD sudah ada yang baru dan diluncurkan," ucap dia.

Sedangkan untuk stakeholders terkait pemeriksaan, ada EAUDITEE, SIKAD, SIPTL dan SIAP CONNECT. Kemudian ada pula E-KAP, CATCHES, Portal IHPS dan Hubungan Internasional.

Selain pemeriksaan, pihaknya juga memiliki banyak aplikasi dalam Sistem Informasi Kelembagaan, baik dari internal maupun eksternal, seperti Kementerian Keuangan. Sistem Informasi Kelembagaan terdiri atas beberapa klaster, yaitu Manajemen Perencanaan

Strategis Evaluasi dan Pengembangan, Manajemen produk dan layanan hukum, manajemen keuangan dan penganggaran, manajemen komunikasi, manajemen TI, manajemen kegiatan dan layanan pimpinan, manajemen Pendidikan dan pelatihan, manajemen pengawasan internal, manajemen dokumen, aset dan rumah tangga, serta manajemen SDM.

PERENCANAAN SUMBER DAYA PEMERIKSAAN

Dari aplikasi-aplikasi itu, data-data kemudian dikumpulkan menjadi ke dalam *auditing resource planning*. *Auditing resource planning* sendiri adalah sebuah platform yang terdiri dari berbagai sistem informasi yang mengotomasi dan mengintegrasikan

fungsi-fungsi proses bisnis pemeriksaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta penunjang pemeriksaan.

Tujuannya adalah menyediakan visibilitas dalam proses pengambilan keputusan, pengintegrasian aplikasi dan

data guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis yang semakin kompleks. Berikutnya meningkatkan kolaborasi dan komunikasi, meningkatkan aksesibilitas informask dan mengurangi biaya dan investasi teknologi informasi. "Ini semua akan mendukung proses transformasi menjadi *digital by default*."

Rudi menambahkan, BPK juga memiliki BPK GO terintegrasi dengan aplikasi yang ada dalam BIDICS atau BPK Big Data Analysis. Beberapa di antaranya adalah SISDM KELOLA TUGAS sebagai sistem informasi sumber daya manusia hingga Portal IHPS yang merupakan aplikasi untuk menyiapkan dan menyusun kesimpulan atau ringkasan laporan hasil pemeriksaan.



Kami ingin menjadi data dan informasi sebagai penggerak dari visi dan misi BPK.



Kenapa Perlu Kewaspadaan Keamanan Informasi

- Keamanan informasi dibangun dalam rantai **People – Process – Technology**
People merupakan mata rantai terlemah
Satu akun dicuri, berpotensi membocorkan data pegawai lain (daftar email, NIP, nomor handphone)
- Informasi yang dikelola BPK memiliki nilai tinggi
- Sistem informasi di BPK saling terhubung
Risiko sumber dan target serangan luas
- Infrastruktur keamanan harus didukung dengan kewaspadaan keamanan

37

Dia menjelaskan, BPK GO merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam versi *web* dan *mobile*. BPK GO Web akan dikembangkan dengan tujuan sebagai media kerja utama *office automation*, yang mempermudah akses ke semua aplikasi internal BPK. Sedangkan BPK GO Mobile dikembangkan dengan tujuan untuk mempermudah pegawai BPK dalam mengakses berbagai macam aplikasi yang sering digunakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari melalui perangkat mobile.

Jenis Serangan

- Phishing Email**
Penipuan melalui email, bertujuan untuk mengambil informasi kredensial (username dan password) atau data pribadi lainnya dengan teknik pengalihan
- Warez, Trojan, Worm**
Program berbahaya (malware) yang bertujuan untuk merubah atau menghancurkan data dan/atau sumber daya dari sistem
- Ransomware**
Salah satu bentuk malware, biasanya mengenkripsi *file* di komputer dan meminta tebusan dalam bentuk cryptocurrency untuk mengembalikan file yang terenkripsi

39

Sementara itu, dalam BIDICS juga termasuk di dalamnya DNA BPK sebagai *digital enterprise architecture*. DNA BPK adalah suatu platform tata Kelola organisasi BPK yang dibangun menggunakan *framework* yang diselaraskan dengan Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI-PMF) untuk memberikan arah pencapaian tujuan secara efisien, serta mengintegrasikan konsep Government Risk Compliance (GRC).

Tindakan Pencegahan

- Selalu meng-update sistem operasi (Windows, MacOS)
- Gunakan password yang kuat, jaga password dengan baik
- Menjaga keamanan data
- Hati-hati dengan attachment dan link di email
- Menjaga keamanan fisik dan akses perangkat
- Mempelajari terus-menerus tentang keamanan informasi
- Melaporkan kejadian mencurigakan ke Biro TI

40

DNA BPK dalam pengelolaannya bertujuan meningkatkan kualitas data organisasi dengan menerapkan standar tata kelola dalam pengelolaan dan pengolahan data untuk mendukung pencapaian tujuan BPK. Kemudian, meningkatkan efektivitas evaluasi dan analisis kinerja, kepatuhan, risiko dan standar pedoman pelaksanaan proses bisnis.

Selain itu, meningkatkan efektivitas proses bisnis dengan memodelkan proses bisnis secara komprehensif, efisiensi portfolio layanan aplikasi, dan mengukur kualitas layanan aplikasi dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis BPK. ~

CATCH, CATHES dan INQUIRY

23

DUKUNGAN KELEMBAGAAN

24

BPK Big Data Analytics (BIDICS)

25



Pengamanan Data

01

Cadangkan (*backup*) data secara teratur ke media yang terpisah.

05

Tidak memasang aplikasi yang tidak dipercaya (*bajakan*).

02

Aktifkan fitur Bitlocker.

06

Berhati-hati menggunakan media portabel (*flashdisk, external HDD*).

03

Pahami jenis-jenis file/data dan ciri-cirinya. Memahami *extension file*.

04

Memahami fungsi dasar file
Contoh : file ber-*extension .exe* merupakan file yang dapat dieksekusi oleh windows.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri



BPK akan Tindak Lanjuti Pertemuan dengan SAI Thailand

KOMISIONER SAO THAILAND MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH ATAS DUKUNGAN BPK DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SAO THAILAND. TERUTAMA DALAM PENGEMBANGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan (*supreme audit institution*-SAI) Thailand atau the State Audit Office of The Kingdom of Thailand (SAO Thailand). Beberapa kegiatan yang direncanakan yakni diskusi konsep kerja sama dalam area yang disepakati.

Mulai dari *cooperative audit*, *workshop* tentang pemeriksaan pada masa yang akan datang, serta pengembangan badan pendidikan dan pelatihan (*badiklat*). Lebih lanjut akan dilaksanakan pula penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) sebagai landasan kerja sama.

Pertemuan diadakan di Kantor Pusat BPK dan Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK, Jakarta, Selasa-Kamis (29-31 Agustus 2023).

Kunjungan delegasi SAO Thailand ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan kelembagaan.

Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan pelaksanaan *courtesy meeting* di kantor pusat BPK, Selasa (29/8/2023). Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK Isma Yatun didampingi Wakil Ketua BPK Hendra Susanto, Sekretaris Jenderal Bahtiar Arif, Kepala Badan Diklat PKN Suwarni Dyah Setyaningsih, serta pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama lainnya.

Sedangkan delegasi SAO Thailand yang berjumlah 39 orang, dipimpin oleh Komisioner SAO Thailand Orapin Phonsuwan Sabyeroop. Kemudian didampingi Deputy Auditor General Klednatee Manosan dan Director of International Affairs Office Sutthi Suntharanurak.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK menyambut seluruh delegasi SAO Thailand dan mengapresiasi kepercayaan mereka sebagai mitra dalam pengembangan kapasitas pemeriksaan dan kelembagaan.

"Sebagai sahabat, BPK menyambut baik permintaan SAO Thailand untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman pemeriksaan pasca-Covid-19, fungsi *foresight*, transformasi digital, serta pengembangan badan pendidikan dan pelatihan," ujar Ketua BPK.

Sementara itu, Komisioner SAO Thailand menyampaikan terima kasih atas dukungan BPK dalam pengembangan kapasitas SAO Thailand. Terutama dalam pengembangan badan pendidikan dan pelatihan. Dia juga mengharapkan BPK dapat meningkatkan kerja sama bilateral pada berbagai topik yang saat ini menjadi prioritas SAO Thailand.

SAO Thailand melakukan kunjungan ini dalam dua kegiatan, yaitu *study visit* dan *cooperative visit* ke kantor pusat BPK dan Badiklat PKN BPK. *Cooperative visit* dilaksanakan oleh 7 orang yang dipimpin Komisioner SAO Thailand. Misi kunjungan ini mempelajari pengembangan pusat pelatihan dan pendidikan dan mendiskusikan kerja sama dengan BPK pada masa yang akan datang.



”**Sebagai sahabat, BPK menyambut baik permintaan SAO Thailand untuk saling bertukar pengetahuan dan pengalaman pemeriksaan pasca-Covid-19, fungsi foresight, transformasi digital, serta pengembangan badan pendidikan dan pelatihan.**

Selanjutnya, *study visit* beranggotakan 32 orang yang sebagian besar merupakan direktur baru di berbagai unit kerja di SAO Thailand. Dipimpin oleh Deputy Auditor General SAO Thailand, kunjungan ini dilakukan dengan misi peningkatan kapasitas dalam berbagai topik yang relevan.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Komisioner SAO Thailand juga berkesempatan menyampaikan presentasi dengan judul "Introduction Public Sector Audit and Fiscal and Financial Discipline in Thailand" kepada para peserta rapat kerja pelaksana BPK tahun 2023.

Materi yang disampaikan adalah prinsip-prinsip dalam peraturan keuangan negara. Kemudian fungsi dan wewenang komisi audit negara dalam kaitannya dengan fiskal dan disiplin keuangan di Thailand serta upaya SAO Thailand dalam mengimplementasikan INTOSAI-P 12 dan INTOSAI-P 50.

Selanjutnya pada kegiatan *study visit* yang diselenggarakan di Badiklat PKN BPK mengusung topik *local government*, *strategy resilience (foresight)*, dan *big data/IT*. Kedua SAI melakukan *sharing session* mengenai adaptasi menghadapi kondisi setelah pandemi (*next normal*). ~



Wakil Ketua BPK Bicara soal BIDICS di Kairo

WAKIL KETUA MENJELASKAN TENTANG TIGA RENCANA STRATEGIS BPK DALAM MELAKSANAKAN *DIGITAL TRANSFORMATION*.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada berbagai lembaga pemeriksa atau *supreme audit institutions* (SAI). Kesempatan ini dilakukan pada saat Wakil Ketua BPK Hendra Susanto menghadiri 7th Meeting of International Organization of Supreme Audit Institution Working Group on Big Data (INTOSAI WGBD) yang diselenggarakan di Kairo, Mesir pada 13-15 September 2023.

Acara yang dihadiri lebih dari 65 peserta dari 26 SAI ini juga melakukan identifikasi tantangan dan kesempatan yang dihadapi dalam bidang audit terkait *big data*. Pertemuan ini dibuka oleh SAI Mesir sebagai tuan rumah dan SAI RRT sebagai ketua sekaligus Sekretariat INTOSAI WGBD.

Dalam pertemuan ini, Wakil Ketua BPK memberikan paparan yang berjudul "Operationalization of Big Data Analytics". Pada paparannya, Wakil Ketua menjelaskan tentang tiga rencana strategis BPK dalam melaksanakan *digital transformation*.

Tiga rencana itu yakni implementasi proses bisnis digital, implementasi tata kelola teknologi informasi, dan implementasi *big data analytics* (BIDICS). Dijelaskan bahwa BIDICS merupakan *platform* implementasi *big data* yang dikembangkan oleh BPK secara *built-in-house*.

BIDICS merupakan salah satu sarana diseminasi praktik analisis data untuk seluruh pegawai. Komponennya



terdiri atas BIDICS Dashboard, BIDICS Self-Service Analytics, BIDICS Engine, BIDICS Development, dan BIDICS Knowledge Management.

Pada akhir paparannya, Wakil Ketua BPK memberikan tiga saran guna meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar-SAI. Pertama, merancang diklat internasional tentang *big data*. Termasuk pengetahuan di bidang *data analytics* dan *artificial intelligence* (AI).

Kedua, merancang tata kelola implementasi *big data* yang dapat mengarah kepada perancangan tata kelola AI. Khususnya pemeriksaan atas lembaga pemerintahan. "Ketiga, mengatur kegiatan pertukaran ahli di antara anggota SAI untuk mempercepat implementasi *big data* dan pengembangan lebih lanjut," kata dia.

Dengan mengambil topik "Application of Big Data in Auditing", pertemuan ini menampilkan 16 paparan. Di sela-sela pertemuan, Vice President dari SAI Mesir El Faisal Yousef mengundang Wakil Ketua BPK untuk melakukan *executive meeting*. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Deputy Auditor General SAI RRT Wang Benqiang, Deputy Comptroller and Auditor General SAI India RG Viswanathan, Deputy Auditor General SAI Vietnam Bui Quoc Dung, Deputy Auditor SAI Kenya Isaac Kamau Nganga, dan Ministro SAI Brasil Johnathan Pereira de Jesus. ~

Dunia yang Didesain dan Ditentukan oleh Keputusan Pria

OLEH **ARI KRISTIANA**

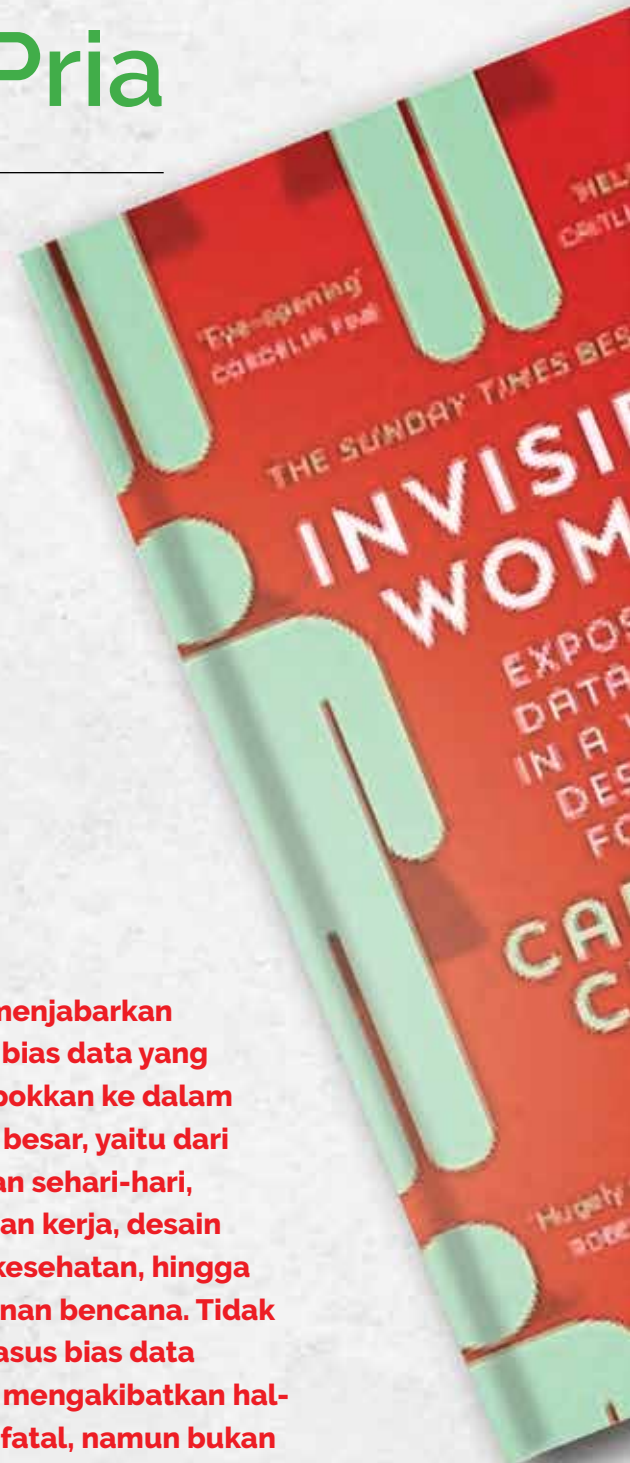
Sadarkah anda bahwa ukuran sebagian besar gawai, terutama telepon seluler sebenarnya terlalu besar untuk ukuran tangan perempuan. Atau anda pernah bertanya-tanya atau bahkan mengalami sendiri, mengapa kesempatan perempuan untuk maju atau mendapat promosi di kantor tidak sebesar para pegawai pria.

Fakta-fakta tersebut terungkap dalam buku berjudul *Invisible Woman*, karya Caroline Criado Perez, seorang penulis yang berasal dari Inggris. Buku yang berjudul lengkap *Invisible Women, Exposing Data Bias in a World Designed for Men* ini, Caroline secara gamblang mengungkapkan seringnya wanita diabaikan dalam berbagai penelitian, pengambilan kebijakan, dan penciptaan produk. Akibat dari pengabaian tersebut adalah wanita sering kali menghadapi kesulitan-kesulitan yang tidak dialami oleh pria, bahkan sampai mengancam jiwa.

Buku setebal 432 halaman versi cetak dan 762 halaman untuk versi e-book ini menjabarkan bagaimana dunia, masyarakat dibentuk berdasarkan standar dan keinginan laki-laki. Penulis misalnya membuka tulisan dengan gambaran bagaimana sejarah panjang dunia ini memang didesain dengan standar laki-laki, sejak zaman purba hingga saat ini.

Dari teori evolusi, teori antropologi, hingga penggunaan bahasa yang sejatinya merupakan bangunan paling dasar dari kehidupan bermasyarakat ternyata mengandung bias gender. Bahasa *online* yang sering kita gunakan saat ini pun, yaitu emoji, pada awalnya juga mengandung bias gender sebelum akhirnya mulai diperbaiki pada tahun 2016.

Penulis menjabarkan 16 kasus bias data yang dikelompokkan ke dalam 6 bagian besar, yaitu dari kehidupan sehari-hari, lingkungan kerja, desain produk, kesehatan, hingga penanganan bencana. Tidak semua kasus bias data tersebut mengakibatkan hal-hal yang fatal, namun bukan berarti boleh dibiarkan.



Selanjutnya penulis menjabarkan 16 kasus bias data yang dikelompokkan ke dalam 6 bagian besar, yaitu dari kehidupan sehari-hari, lingkungan kerja, desain produk, kesehatan, hingga penanganan bencana. Tidak semua kasus bias data tersebut mengakibatkan hal-hal yang fatal, namun bukan berarti boleh dibiarkan.

Dalam ilmu kesehatan, pengabaian atas anatomi tubuh wanita dalam mendiagnosa penyakit atau dalam uji klinis obat seringkali membuat para wanita tidak mendapatkan pengobatan yang sesuai. Menurut argumen penulis, pengabaian tersebut terjadi sejak lama, karena dalam ilmu kedokteran diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara tubuh laki-laki dan perempuan kecuali ukuran dan reproduksi, sehingga selama bertahun-tahun pendidikan kesehatan hanya fokus pada norma standar, yaitu laki-laki.

Sedangkan yang terjadi sebenarnya adalah perbedaan jenis kelamin ini sangat berpengaruh dalam mekanisme tubuh manusia. Penjelasan ini mengingatkan pada kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi yaitu keterlambatan haid yang banyak dialami wanita setelah menerima vaksin Covid-19.

WHO dan para produsen vaksin tidak dapat menjelaskan apakah keterlambatan haid tersebut berhubungan dengan vaksinasi. Alasannya jelas, para peneliti tidak memisahkan, mencatat, dan melaporkan data peserta uji klinis berdasarkan jenis kelamin. Hal ini merupakan pengabaian gender dalam kedokteran, dan ini bisa berbahaya.

Dalam bab kehidupan sehari-hari, disajikan kasus kebijakan pembersihan salju oleh pemerintah satu kota di Swedia yang akhirnya diubah sehingga mengurangi bias *gender*. Puluhan tahun lamanya pembersihan salju diutamakan dilakukan pada jalan arteri, sedangkan *pedestrian* mendapat giliran paling akhir. Kebijakan ini sangat tidak menguntungkan para wanita sebagai pengguna *pedestrian* yang lebih sering daripada laki-laki.

Pada tahun 2011 pemerintah lokal melakukan evaluasi komprehensif atas kebijakan tersebut yang berujung pada perubahan kebijakan. Pembersihan salju diawali pada *pedestrian* baru terakhir jalan arteri. Akibat dari perubahan kebijakan ini tidak saja menguntungkan wanita, namun juga anak-anak dan orang tua yang memang lebih sering tergantung pada wanita.

Dalam dunia kerja, penulis menggambarkan dengan sangat jelas tentang meritokrasi yang sebenarnya sangat bias *gender*, dan banyak kasus lainnya. Sebuah penggambaran yang sangat membuka mata kita, betapa dunia ini memang sangat patriarki.

Buku ini diterbitkan pada tahun 2019 oleh Abram Press dan telah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa yang sayangnya saya tidak menemukan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Namun tidak perlu khawatir, Bahasa Inggris yang digunakan dalam buku ini relatif mudah dipahami.

Para kritikus dan media memberikan *review* yang baik atas buku yang menjadi Sunday Times Bestseller ini. Times menyebut buku ini sebagai "A game changer", sedangkan Cordelia Fine memberikan response "eye opening" karena memang buku ini sangat mencerahkan.



Judul : **Invisible Women, Exposing Data Bias in a World Designed for Men**
 Penulis : **Caroline Criado Perez**
 Penerbit : **Abram Press**
 Tahun terbit : **2019**
 Jumlah halaman : **432 halaman**

Selain mendapat banyak pujian dari kritikus dan media, buku ini juga mendapat berbagai penghargaan, antara lain selama tahun 2019 menjadi pemenang dalam Royal Society Science Book Prize, Books Are My Bag Readers Choice Award, dan Financial Times Business Book of the Year Award.

Caroline sendiri adalah seorang penulis dan penggiat feminisme lulusan University of Oxford dan London School of Economics, dua kampus bergengsi di Inggris. Atas aktivitasnya, Caroline pernah menerima penghargaan Liberty Human Rights Campaigner of the Year award pada tahun 2013 dan Order of the British Empire award pada tahun 2015. Pada tahun 2021 yang baru saja berlalu dia menerima gelar doktor kehormatan dari University of Lincoln.

Selain *Invisible Woman*, Caroline juga menulis buku berjudul *Do it Like a Woman*, yang diterbitkan pada tahun 2015. Meskipun baru menghasilkan dua buku, Caroline dapat menulis buku ini dengan cara dan bahasa yang sangat menarik. Dia banyak mengawali pembahasan dengan kasus-kasus nyata sehingga dapat memberikan gambaran secara lebih jelas kepada pembaca.

Misalnya dalam bab 5 tentang The Henry Higgins Effect, dia membuka bab dengan cerita tentang seorang petinggi Facebook yang baru menyadari perlunya tempat parkir khusus wanita hamil setelah dia merasakan kehamilan pertama kali. Dalam tulisan tentang One-Size-Fits-Men Caroline membuka bab dengan cerita seorang pianis yang bertahun-tahun kesulitan menggunakan tuts piano tradisional karena ukuran tangannya yang lebih kecil dari kebanyakan pria.


Cerita ini kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang tangan wanita yang juga lebih daripada laki-laki, sehingga pianis wanita seringkali juga kesulitan menggunakan piano yang didesain dengan standar ukuran tangan laki-laki.

Selain memberikan gambaran kasus, penulis menambahkan argumennya dengan data dan statistik yang cukup lengkap yang diambil dari berbagai media dan penelitian. Satu contoh kecil misalnya pada bab 2 tentang Gender Neutral With Urinals, penulis menyajikan data tentang jumlah toilet di Mumbai, India, salah satunya adalah terdapat ribuan toilet umum untuk laki-laki namun namun tidak ada satu pun yang khusus wanita.

Yang disediakan oleh pemerintah adalah toilet umum yang digunakan bersama antara pria dan wanita. Akibatnya sudah dapat diduga, jumlah kekerasan seksual yang dialami wanita di sana dari keterbatasan toilet ini cukup tinggi.

Sayangnya, penyajian data berupa angka di buku ini agak terlalu banyak dan sering berurutan, sehingga kadang agak membingungkan bagi pembaca. Tidak semua pembaca dapat mencerna arti dari kumpulan angka yang disajikan secara deskripsi, sehingga akan jauh lebih mudah dipahami jika pengungkapan data tersebut diselingi dalam bentuk lain seperti komparasi atau bentuk sederhana lainnya.

Selain itu, informasi yang disampaikan terlalu banyak, sehingga saya sempat kehilangan fokus ketika membaca satu permasalahan. Namun demikian secara umum buku ini sangat menarik dan mencerahkan. Para pengambil kebijakan, para peneliti, para penggiat pergerakan wanita, atau bagi masyarakat umum, buku ini *worth it* dan sangat dianjurkan untuk dibaca. Supaya semakin banyak yang sadar akan adanya *gender bias*. ~



Selain mendapat banyak pujian dari kritikus dan media, buku ini juga mendapat berbagai penghargaan, antara lain selama tahun 2019 menjadi pemenang dalam Royal Society Science Book Prize, Books Are My Bag Readers Choice Award, dan Financial Times Business Book of the Year Award.



PENGAMANAN Email



Teliti sebelum membuka email

- Baca *subject*.
- Periksa alamat pengirim.
- Pastikan tidak ada hal yang mencurigakan.



Membuka email di perangkat yang dipastikan keamanannya.



Tidak membuka *attachment* atau klik link yang belum dapat dipastikan keamanannya/dikirim oleh orang tidak dikenal.

Berhati-hati jika harus membuka email di komputer publik (misalnya warnet atau komputer di bandara).



Pastikan *logout* dari aplikasi email jika menggunakan perangkat publik/orang lain.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri

Terus Sederhanakan Proses Bisnis

KEMENPAN-RB SECARA BERTAHAP MENDORONG PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar

Anas meminta kementerian dan lembaga (K/L) terus menjalankan reformasi birokrasi. Azwar pun berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus melakukan terobosan, terutama dalam hal proses pemeriksaan.

Hal tersebut disampaikan Azwar dalam Rapat Kerja (raker) pelaksana BPK 2023, di kantor pusat BPK, Jakarta, pada akhir Agustus. Menurut Azwar, saat ini proses yang terjadi dalam pengembangan sumber daya ASN berjalan seperti rutinitas atau *business as usual*.

Padahal, kata Azwar, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan reformasi birokrasi tidak boleh terjebak dalam rutinitas. Selain itu, proses birokrasi tidak boleh panjang dan bertele-tele, namun harus cepat dan tepat.

"Kita ini belum bekerja, sudah dipasang UU bagaimana membuat laporan. Sehingga banyak orang bekerja, yang penting jawabannya cukup. Ada banyak pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan satu hari, tapi dikerjakan 10 hari. Pekerjaan 10 hari, tapi bisa menjadi tiga bulan hanya karena atas nama SPJ, atas nama perjalanan dinas," ungkap dia.



■ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas

Oleh karena itu, ia mengingatkan kepada seluruh ASN, termasuk pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjauhi proses rutinitas dalam menjalankan reformasi birokrasi. "Budaya *business as usual* ini adalah yang wajib diubah dalam proses pengembangan sumber daya manusia oleh KemenPANRB."

Atas alasan itu, KemenPANRB terus menggalakkan reformasi birokrasi. Ia mencontohkan, dalam satu dasawarsa terakhir, proses rekrutmen ASN sudah berlangsung sangat transparan, yaitu lewat Computer Assisted Test (CAT). Bahkan, ucap dia, anak Presiden Jokowi, yaitu Kahiyang Ayu tidak lolos dalam proses CPNS Pemkot Solo.

Berikutnya, dalam proses birokrasi, pihaknya masih melakukan proses perbaikan tumpang tindih kebijakan. Sehingga saat ini, satu Peraturan Pemerintah (PP) dapat merangkum seribu lebih aturan sebelumnya. "Kita tidak bisa terus terjebak dalam tumpukan kertas," ucap dia.

Kedua, menurut dia adalah penyederhanaan proses bisnis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hal ini sudah menjadi amanat Presiden Jokowi. Hal ini juga menjadi tuntutan zaman atau tren dunia saat ini.

Ia mencontohkan, saat ini untuk naik pangkat tidak perlu melewati 14 tahap, namun cukup dua tahap. Layanan administrasi dari 11 tahap menjadi tiga tahap. Begitu juga layanan pensiun, dari 8 tahap menjadi tiga tahap saja.

"Audit BPK misalnya dulu ada 11 proses bisnis, dengan digital sekarang, bisa kita pangkas menjadi 3 proses bisnis," ucap dia. Proses pendidikan dan pelatihan juga saat ini diisi oleh orang-orang muda, dari 16 tahap dipangkas menjadi 5 tahap.

"Nah inilah proses-proses bisnis yang mesti kita kerjakan bersama. Dan kami sangat berharap di BPK, akan ada terobosan-terobosan baru lagi, termasuk proses bisnis audit yang ke depan saya kira ini akan bisa lebih baik," ucap dia.

AGENDA PRIORITAS

Dalam proses reformasi birokrasi, Azwar menyebut ada beberapa agenda prioritas. Agenda pertama adalah desain birokrasi. Desain birokrasi harus disesuaikan dengan agenda prioritas pembangunan, sehingga sesuai dengan yang akan diinginkan mencapai Indonesia di tahun mendatang.

Berikutnya adalah reformasi berdasarkan target. Saat ini untuk kementerian dan lembaga (K/L) dan provinsi sudah melampaui target indeks reformasi birokrasi. Akan tetapi, pada tingkat kabupaten kota belum mencapai target yang berdasarkan RPJMN yakni target 65 persen baru tercapai 32,29 persen.

"Perlu dilakukan percepatan kualitas transformasi birokrasi di tingkat kabupaten kota khususnya diluar Jawa dan Bali," ungkap dia.

Penajaman arah reformasi birokrasi juga fokus kepada dampak. Dampak dalam artian proses reformasi birokrasi, misalnya, adalah turunnya angka kemiskinan dan *stunting*.

"Ke depan kami akan terus berkoordinasi, berkomunikasi kepada auditor-auditor yang menangani Menteri PAN-RB, sehingga harapannya seluruh penilaian berbasis pada kondisi ini," tutur dia.

Berikutnya, terkait investasi, dimana ia yakin lewat layanan birokrasi yang baik maka investasi akan naik. Selain itu, kualitas belanja produk dalam negeri melalui e-catalog. Belanja melalui e-catalog sudah menjadi target prioritas, sebagaimana arahan Presiden.



Ke depan kami akan terus berkoordinasi, berkomunikasi kepada auditor-auditor yang menangani Menteri PAN-RB, sehingga harapannya seluruh penilaian berbasis pada kondisi ini.

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Terkait *grand design* reformasi birokrasi, pemerintah terus menggeber transformasi digital. Didalamnya, terdapat perubahan *digital culture* dan *digital competency*.

Perubahan *digital culture* dan *competency* ditanggapi oleh Kemenpan-RB dengan secara bertahap mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemberantasan korupsi diyakini akan lebih efektif jika SPBE berjalan.

Azwar yakin dengan diterapkannya SPBE, maka *government development* indeks akan meningkat sesuai dengan perbaikan kualitas pelayanan publik. "Begitu SPBE ini menjadi target prioritas pemerintah, tidak ada cara mempercepat untuk melipatgandakan pencapaian suatu negara selain dengan SPBE," ucap dia.

Lewat SPBE, maka proses digitalisasi akan memangkas tenaga pelaksana di lapangan. Apalagi, saat ini, menurut dia ada anomali dalam birokrasi. Meski anggaran digitalisasi meningkat, namun juga ada penambahan tenaga pelaksana.

Mestinya, dengan menambah digitalisasi, pemangkasan proses bisnisnya berjalan, tenaga pelaksana teknis juga akan berkurang. Inilah yang saat ini KemenPAN-RB minta dari BKN untuk memperbaiki anomali data.

"Anomali data kita sudah tinggi banget sekarang udah 98,2 persen. Saya bilang sebelum anomali data ini dibereskan, kita tidak berani ketemu Presiden, dan kita tidak bisa memprediksi ke depan mana pegawai kita yang *positif growth*, *zero growth*, dan *negative growth*," ucap dia.

Meski belum banyak diketahui, namun proses SPBE atau digitalisasi mulai terlihat. Berdasarkan data BKN, di Pemprov DKI, lewat digitalisasi dimana dibutuhkan tadinya 500 karyawan menjadi saat ini hanya butuh 30 orang.

"Jadi sekarang sudah berubah seiring dengan digitalisasi. Semoga ke depannya bersama-sama ini menjadi apa yang kita perjuangkan, untuk mencapai tujuan bersama-sama. Pemangkasan proses bisnis, digitalisasi menjadi agenda kita sekarang," tutur dia. ~



@bpkriofficial



www.bpk.go.id



BPK RI Official



@bpkri



@humasbpkri.official



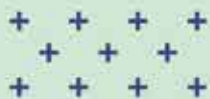
08111907010



@bpk.ri



▶ BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.



Pentingnya Bersikap Asertif dalam Berkomunikasi

TUJUAN UTAMA PERILAKU ASERTIF ADALAH MEMBUAT PROSES KOMUNIKASI BERJALAN EFEKTIF, MEMBANGUN HUBUNGAN YANG SETARA, SEJAJAR, DAN SALING MENGHORMATI.



PRESSFOTO-FREEPIK

Sering kali kita mengalami kesulitan dalam mengungkapkan perasaan serta pendapat kepada orang lain, khususnya dalam ruang lingkup kerja atau lingkungan baru. Tentu saja alasannya karena kita merasa tidak enak saat akan mengucapkan suatu pendapat kepada rekan kerja atau tim saat dalam suatu pertemuan/*meeting*.

Rasa tidak enak tersebut muncul karena takut menyakiti perasaan orang lain atau bahkan menghakimi secara tidak langsung. Permasalahan tersebut sejatinya berkaitan dengan keterampilan komunikasi asertif.

Padaahal, ada beragam keuntungan ketika anda mampu mengomunikasikan sesuatu dengan baik tanpa menyakiti orang lain atau keterampilan komunikasi asertif. Lalu apa makna dari perilaku asertif?

Perilaku asertif adalah kemampuan untuk mengomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain secara jujur dan terbuka dengan tetap menghormati hak pribadi dan orang lain.

“Orang yang asertif mampu untuk berkata ‘tidak’, mampu meminta pertolongan, mampu mengekspresikan perasaan positif dan negatif secara wajar,” demikian menurut artikel yang dibuat Employee Care Center BPK. ~

Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan seseorang jika memiliki sikap asertif:

- 1 Mudah berteman.
- 2 Meningkatkan rasa percaya diri.
- 3 Dihormati, dihargai serta disegani orang lain.
- 4 Meningkatkan skill dalam mengambil keputusan.
- 5 Tidak akan merasa ditindas atau dimanfaatkan oleh lingkungan sekitar.

Tujuan utama perilaku asertif adalah membuat proses komunikasi berjalan efektif, membangun hubungan yang setara, sejajar, dan saling menghormati.

Berikut adalah contoh perilaku asertif:



Menolak permintaan rekan kerja ketika Anda sedang sibuk dengan tanggung jawab sendiri.

Memberikan ide dan tanggapan ketika mengikuti *focus group discussion* atau rapat besar.

Tidak memaksakan pendapat pribadi untuk disetujui semua orang.

Tidak memotong pembicaraan dengan atau tanpa alasan.

Tidak mudah terpancing emosi dan tidak mencampuri urusan orang lain yang tidak ada keterkaitan dengan Anda.

STUDIOGSTOCK-FREEPIK

Membudayakan Olahraga

TINGKAT PARTISIPASI OLAHRAGA DI INDONESIA MENGALAMI PENURUNAN PADA 2022.

“**Tantangan bagi Kemenpora adalah bagaimana bisa membuat instrumen atau program yang sifatnya koordinatif tapi setiap tahapan atau proses berkelanjutan dilakukan.**”

Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) setiap 9 September. Haornas bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya olahraga. Hingga saat ini, masih ada berbagai tantangan yang dihadapi untuk membudayakan olahraga. Tingkat partisipasi olahraga juga belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan.

Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Suyadi Pawiro mengakui, meningkatkan partisipasi olahraga masih menjadi salah satu pekerjaan rumah. Pawiro mengungkapkan, berdasarkan data Sport Development Index (SDI), pemuda utamanya yang SMA, menjadi kelompok dengan tingkat partisipasi tertinggi di antara kelompok yang lain. "Celakanya setelah usia pemuda (SMA) hampir di semua negara, terjadi penurunan tingkat partisipasi olahraga," kata Suyadi kepada *Warta Pemeriksa*.

Mengutip Laporan Nasional Sport Development Index 2022, tingkat partisipasi olahraga sebesar 30,93 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang sebesar 32,80 persen.

Indikator partisipasi aktif merujuk pada angka partisipasi anggota masyarakat berusia 10-60 tahun yang melakukan aktivitas olahraga/aktivitas fisik minimal tiga kali seminggu.

Lalu, apa saja program Kemenpora untuk membudayakan olahraga? Suyadi mengatakan, Kemenpora yang fungsi utamanya adalah menyusun regulasi, membuat kebijakan, berfungsi mengoordinasikan, mendorong, memberikan stimulan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam mendorong masyarakat untuk aktif berolahraga.

Dia mengungkapkan, terdapat perbedaan tingkat partisipasi masyarakat yang ada di kota dan yang ada di desa. Tren di kota, semakin baik ekonomi masyarakat, maka semakin tinggi tingkat partisipasinya di olahraga.



■ Suyadi Pawiro

"Tentu saja bisa dimaklumi ketika ekonomi masyarakatnya rendah, kelas menengah ke bawah, tentu saja orientasi utamanya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga tantangan bagi Kemenpora adalah bagaimana bisa membuat instrumen atau program yang sifatnya koordinatif tapi setiap tahapan atau proses berkelanjutan dilakukan," kata Suyadi.

Dia menjelaskan, ada berbagai program keolahragaan sebagaimana disepakati di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ada festival olahraga, festival yang sifatnya nasional dan juga daerah, dan *event-event extreme sport*.

"Ada juga festival olahraga usia dini, kita juga kebersamai teman-teman disabilitas yang muda, kita juga terlibat di situ."

Suyadi menambahkan, ada banyak kerja sama yang dibangun Kemenpora dengan kementerian lembaga, termasuk kolaborasi dengan pihak swasta, BUMN.

Suyadi mengingatkan, olahraga sangat penting untuk kesehatan dan kebugaran. "Kita bisa jadi orang yang sangat pintar tapi sakit-sakitan, maka produktivitas kita akan menurun, daya tahan akan jadi tidak maksimal, sehingga olahraga menjadi bagian dari itu. Jadi kalau ditanya seberapa penting, ya sangat penting," katanya.

Menurut dia, digitalisasi sebenarnya bisa menjadi alat yang cukup baik untuk mendorong anak muda berolahraga, yaitu bagaimana memaksimalkan media sosial dan teknologi informasi ke depan untuk semakin masif mengajak dan memberikan modelling kepada masyarakat dan anak-anak muda untuk berolahraga.

"Yang pasti yang jauh lebih mampu memaksimalkan teknologi informasi itu adalah anak muda. Bagaimana mengajak mereka, mendorong mereka menginisiasi berbagai hal yang terkait dengan olahraga melalui platform digital." ~





Pengamanan **Password**



- **Gunakan *password* yang kuat**

Panjang *password* minimal 8 karakter.

- Menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka.

- Tidak menggunakan kata yang mudah ditebak atau terdapat dalam kamus.

- **Tidak menggunakan angka atau kata yang bermakna identitas diri**
Contoh : tanggal lahir, NIP, nama anak, nama binatang peliharaan, dan sebagainya.

Jaga Keamanan **Password**

Tidak berbagi *password* dengan orang lain.

Tidak menggunakan *password* yang sama untuk sistem/aplikasi yang berbeda.

Contoh : menggunakan *password* yang berbeda untuk sosmed dan akun BPK.

Tidak menuliskan *password* di kertas/media lain yang terlihat dengan mudah.

Logout dari aplikasi yang sudah tidak digunakan.



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpk.ri

BPK Minta Kementerian BUMN Perhatikan Permasalahan yang Ditemukan

ANGGOTA VII BPK MENEGASKAN PENTINGNYA PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BPK YANG BERKUALITAS DAN BERMANFAAT. INI SESUAI VISI BPK, YAITU MENJADI LEMBAGA PEMERIKSA TEPERCAYA YANG BERPERAN AKTIF DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA YANG BERKUALITAS DAN BERMANFAAT UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan perhatian terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Hal ini menyikapi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian BUMN tahun anggaran 2022.

Pada pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK Kementerian BUMN tahun 2022. Ini merupakan opini WTP yang keempat kalinya sejak 2019.

"Tentunya, hal ini perlu mendapatkan apresiasi, sebab opini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian BUMN dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara," ujar Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada Menteri BUMN Erick Thohir di kantor pusat BPK, Jumat (1/9/2023).

Dia menjelaskan, memang Kementerian BUMN telah memperoleh opini WTP. Akan tetapi, bukan berarti LK Kementerian BUMN bebas dari permasalahan dan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"BPK mengharapkan agar beberapa permasalahan dan kelemahan tersebut mendapat perhatian dari segenap pimpinan Kementerian BUMN untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan langkah-langkah penyelesaian yang komprehensif disertai mitigasi risiko yang memadai. Sehingga di tahun yang akan datang opini atas LK Kementerian BUMN dapat dipertahankan," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Anggota VII BPK menegaskan pentingnya pelaksanaan pemeriksaan BPK yang berkualitas dan bermanfaat. Ini sesuai visi BPK, yaitu menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.



Opini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian BUMN dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara.

Anggota VII BPK juga menyampaikan akan segera mengembangkan *database track record* terhadap pengurus dan pejabat. Termasuk juga pegawai yang dinilai bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ditimbulkan pada BUMN. Tujuannya, untuk mendorong pencegahan korupsi.

"Hal ini penting untuk memberikan dukungan penguatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BUMN, khususnya di level direksi dan komisaris BUMN. Dengan cara memberikan informasi kepada Kementerian BUMN atas kinerja pejabat direksi dan komisaris berdasarkan hasil pemeriksaan BPK," kata dia. ~



Ketua BPK: Akuntabilitas adalah Pondasi Utama

PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM SIKLUS ANGGARAN BERTUJUAN UNTUK MEMASTIKAN BAHWA PENERIMAAN DAN BELANJA PEMERINTAH TELAH DIRENCANAKAN, DILAKSANAKAN, DAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN DENGAN BAIK.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yaton menegaskan bahwa akuntabilitas adalah salah satu pondasi utama dalam mewujudkan *good governance*. Termasuk di dalamnya adalah akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Hal itu disampaikan pada saat memberikan ceramah kepada peserta program pendidikan singkat angkatan (PPSA) XXIV Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tahun 2023 di gedung Lemhanas, Jakarta, Senin (11/9/2023). Ketua BPK menyampaikan ceramah yang mengangkat tema "Akuntabilitas Anggaran di Sektor Publik".

Dia menjelaskan, penerapan *good governance* dalam siklus anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa penerimaan dan belanja pemerintah telah direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Termasuk telah diaudit oleh lembaga pemeriksa eksternal yang independen.

"Secara umum, anggaran pemerintah yang akuntabel adalah mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, pertanggungjawaban pemerintah, dan mekanisme pengawasan yang efektif," jelas Ketua BPK dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, Wakil Gubernur Lemhanas Mohamad Sabrar Fadhilah, dan Auditor Utama Keuangan Negara I, Akhsanul Khaq.





"Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sambil meneguhkan keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan keuangan pemerintah," tambah dia.

Menurut Ketua BPK, melalui anggaran yang akuntabel maka pemerintah turut memperkuat demokrasi dan memupuk kepercayaan masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara.

"Inilah mengapa, seluruh peserta PPSA harus terus konsisten menegakkan prinsip, aturan, dan pedoman pengelolaan anggaran yang baik. Mengingat mayoritas peserta PPSA mengemban amanah penting dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran di institusi masing-masing," ujarnya.

Ketua BPK juga mengatakan, kebijakan pemeriksaan BPK sebagai pelaksanaan fungsi pemeriksaan eksternal dalam siklus penganggaran

menunjukkan pergeseran fokus akuntabilitas anggaran. Tidak hanya sekadar penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Namun lebih dari itu, yakni bagaimana belanja yang dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dapat berdampak pada tujuan pembangunan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

”**Secara umum, anggaran pemerintah yang akuntabel adalah mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, pertanggungjawaban pemerintah, dan mekanisme pengawasan yang efektif.**

Peserta PPSA berjumlah 80 orang yang terdiri dari berbagai unsur. Dari unsur kementerian, terdapat 7 orang, unsur lembaga negara sebanyak 11 orang, unsur organisasi kemasyarakatan sebanyak 1 orang, unsur badan usaha sebanyak 3 orang, unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebanyak 36 orang, dan Polisi Republik Indonesia (Polri) sebanyak 22 orang. ~



BPK akan Lakukan Pemeriksaan Terhadap 4 DOB

SASARAN PEMERIKSAAN BERFOKUS KEPADA SIKLUS PENGELOLAAN, YAITU ASPEK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran (TA) 2022 s/d triwulan III TA 2023 atas empat daerah otonomi baru (DOB) pada semester II tahun 2023. Pemeriksaan kepatuhan tersebut dilaksanakan untuk mendukung pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) TA 2023.

"Meningat telah diresmikannya DOB, maka BPK berkewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada keempat DOB tersebut," ujar Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VI BPK Pius Lustrilanang pada kegiatan *entry meeting*, di kantor pusat BPK, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Keempat DOB tersebut yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan, Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Pegunungan, dan Pemprov Papua Barat Daya. Anggota VI BPK menjelaskan, LKPD empat provinsi DOB untuk pertama kalinya akan diperiksa oleh BPK pada 2024.

Anggota VI BPK mengatakan, dalam pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah pada empat provinsi DOB, BPK mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pada pemeriksaan itu, menunjukkan ketidaktertiban dalam pertanggungjawaban belanja.

"Oleh karena itu, pemeriksaan ini ditujukan untuk memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan atas pengelolaan



belanja daerah pada Pemprov Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya," kata Anggota VI BPK.

Menurutnya, sasaran pemeriksaan berfokus kepada siklus pengelolaan, yaitu aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Dengan lingkup jenis belanja, yaitu belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja modal; belanja hibah; belanja bantuan sosial (bansos); dan belanja tak terduga. ~

Permintaan Informasi & Pengaduan Masyarakat Lebih Mudah Pakai PPID BPK Mobile

**Segera Unduh di Playstore
BPKawan!!**



Standar Kompetensi Bagi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SDM PBJP)



SAOR EIRENE

PENGELOLA PENGADAAN
BARANG/JASA AHLI MUDA
BADIKLAT PKN BPK

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

DALAM MENGEMBANGKAN SDM PBJP BERBASIS KOMPETENSI, INSTANSI PEMBINA/LKPP MENETAPKAN STRATEGI UNTUK MENDAPATKAN SDM PBJP PROFESSIONAL DENGAN MENGACU KEPADA STANDAR KOMPETENSI PBJP DENGAN DIKLAT PBJP DAN PEMEROLEHAN SERTIFIKASI PBJP.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa adalah dengan mewujudkan PBJP yang menghasilkan *value for money* dengan para SDM PBJP yang kompeten di bidangnya. Standar kompetensi kerja merupakan dasar dari manajemen Pengembangan SDM berbasis Kompetensi, pada dasarnya adalah rumusan/deskripsi mengenai tiga hal pokok yang berkaitan dengan kemampuan kerja sebagai berikut (berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 70 Tahun 2016):

1. Deskripsi tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang di tempat kerja sesuai dengan tugas pekerjaan serta kondisi dan lingkungan kerjanya;
2. Deskripsi tentang sejauh mana kinerja yang diharapkan dapat ditampilkan oleh seseorang sesuai dengan tugas pekerjaan serta kondisi dan lingkungan kerja sebagaimana butir 1;
3. Deskripsi tentang bagaimana caranya mengetahui/mengukur bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, seseorang telah atau belum mampu menampilkan kinerja yang diharapkan sebagaimana dimaksud pada butir 2.

Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 (Perpres 16/2018) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Rangkaian proses PBJP itu sendiri melibatkan para pihak Pelaku PBJP, sejak tahap Perencanaan Pengadaan yang hasil akhirnya menghasilkan RUP oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat dibantu oleh Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJP di lingkungan

K/L/PD dan ditetapkan/ diumumkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, tahap pemilihan penyedia oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja Pemilihan yang dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli atau Agen Pengadaan, dan tahap pengelolaan/ pengendalian kontrak sampai dengan serah terima oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat dibantu oleh tim pendukung atau tenaga ahli.

Dalam pelaksanaannya, PBJP menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut: Peran PBJP masih dianggap administratif pemilihan penyedia barang/jasa, kelembagaan PBJP belum struktural dan PBJP sebagai tusi tambahan, PBJP dikerjakan oleh staf paruh waktu dan tidak profesional, dan Sistem remunerasi yang kurang menarik, dan keempat hal ini mengakibatkan risiko potensial berupa risiko non fisik (rentan terhadap tindak pidana) dan risiko fisik (keterlambatan program kerja atau mendapatkan kualitas barang/ jasa yang rendah).

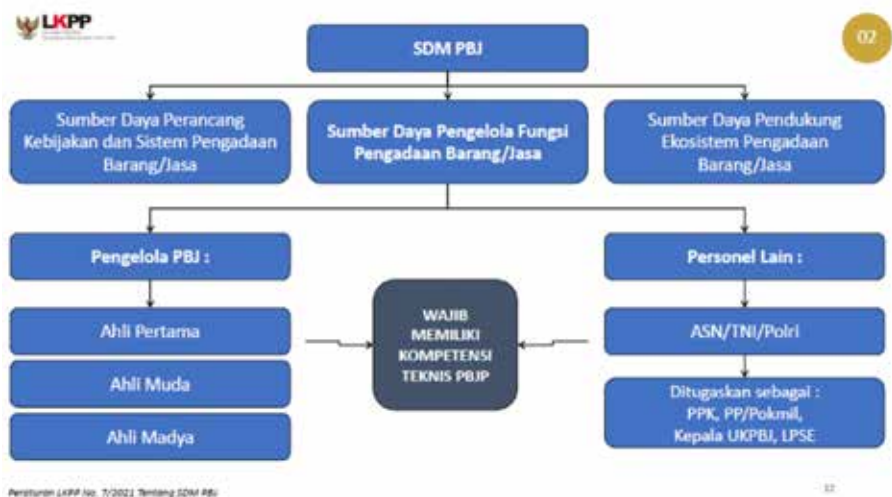
SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA

SDM PBJP terdiri atas :

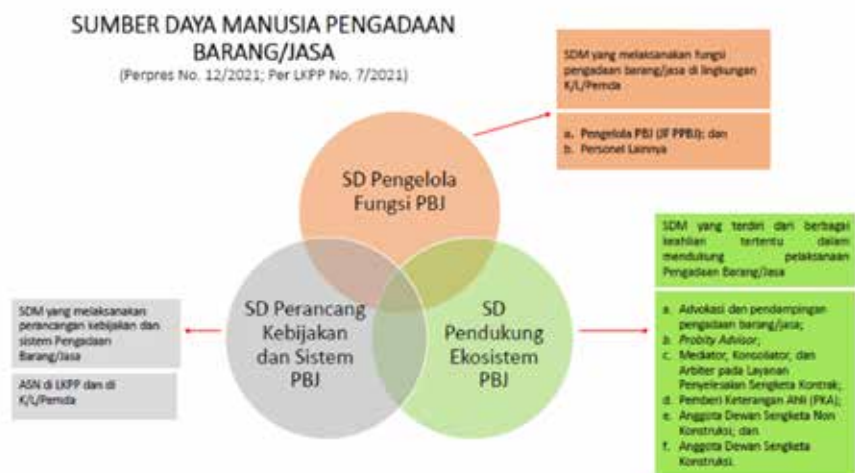
1. Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;
2. Aparatur Sipil Negara/ Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
3. Personel selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pengelola PBJP pada poin 1 adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan PBJP, sedangkan SDM PBJP pada poin 2 dan 3 diwajibkan memiliki Kompetensi di bidang PBJP karena belum termasuk dari kategori poin 1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) merasa perlu untuk mengatur lebih lanjut terkait SDM PBJP dimaksud, dan terbitlah aturan turunan Perpres 16/2018 melalui Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 (PerLKPP 7/2021) tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/ Jasa, dimana pedoman Pengembangan dan pembinaan SDM PBJP serta pengembangan dan pembinaan Pengelola PBJP diatur secara detil di PerLKPP tersebut. PerLKPP 7/2021 menjelaskan kembali namun lebih rinci terkait SDM PBJP, yang terdiri atas:

1. Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJP, merupakan SDM yang melaksanakan fungsi PBJP di lingkungan K/L/PD;
2. Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem PBJP, merupakan SDM yang melaksanakan perancangan kebijakan dan sistem PBJP; dan
3. Sumber Daya Pendukung Ekosistem PBJP, merupakan SDM yang terdiri dari berbagai keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan PBJP.



Gambar 1. Penjelasan SDM PBJP Berdasarkan PerLKPP 7/2021



Gambar 2. Para SDM PBJP

Dalam mengembangkan SDM PBJP berbasis kompetensi, Instansi Pembina/ LKPP menetapkan strategi untuk mendapatkan SDM PBJP professional dengan mengacu kepada standar kompetensi PBJP dengan Diklat PBJP dan pemerolehan Sertifikasi PBJP.



Gambar 3. Strategi Pengembangan SDM PBJP Berbasis Kompetensi

PENGELOLA FUNGSI PBJ

Pengelola Fungsi PBJ terdiri atas Pengelola PBJ dan Personel Lainnya. Pengelola PBJ merupakan Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan PBJP; Personel lainnya merupakan Personel selain Pengelola PBJ yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan PBJP, dan setiap pengelola wajib memiliki Kompetensi di bidang PBJP sesuai dengan Standar Kompetensi yang mengacu pada Kamus Kompetensi Teknis PBJP dan terdiri atas : Standar Kompetensi level-1, Standar Kompetensi JF PPBJP, dan Standar Kompetensi Personel Lainnya. Untuk Standar Kompetensi level-1 wajib dipenuhi bagi Pengelola Fungsi PBJ.

Standar Kompetensi level-1 yang merupakan modal awal bagi Pengelola Fungsi PBJ, meliputi kegiatan-kegiatan berikut: Pengantar Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management), Pengantar PBJP, serta Kompetensi Teknis PBJP level-1 yang meliputi Jenis Kompetensi Melakukan Perencanaan PBJP level-1, Jenis Kompetensi Melakukan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah level-1, Jenis Kompetensi Melakukan Pengelolaan Kontrak PBJP level-1, dan Jenis Kompetensi Melakukan Pengelolaan PBJP secara Swakelola level-1. Kompetensi teknis yang dimaksud di atas merupakan transformasi dari:

1. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau LKPP dengan kategori L2, L4, dan L5; dan
2. Sertifikat Keahlian Dasar yang dikeluarkan oleh LKPP berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015.

Standar Kompetensi JF PPBJP merupakan Standar Kompetensi yang diperuntukkan bagi Pengelola Fungsi PBJP yang merupakan Pejabat Fungsional Pengelola PBJP meliputi:

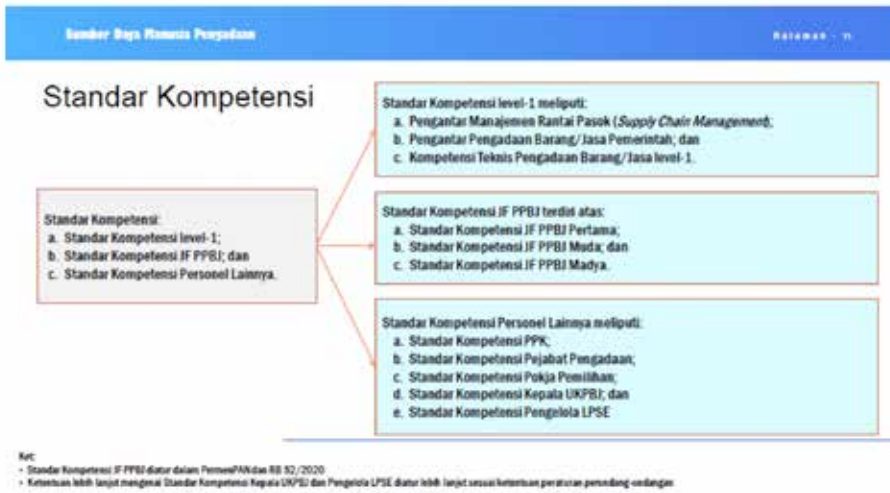
1. Kompetensi Teknis PBJP (Perencanaan PBJP Pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah, pengelolaan kontrak PBJP Pemerintah, pengelolaan PBJP Pemerintah secara Swakelola);
2. Kompetensi Manajerial (integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, Pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan); dan
3. Kompetensi Sosial Kultural (perekat bangsa).

Adapun Standar Kompetensi JF PPBJP terdiri atas Standar Kompetensi JF Pengelola PBJP Pertama (Standar Kompetensi level-2), Standar Kompetensi JF Pengelola PBJP Muda (Standar Kompetensi level-3), dan Standar Kompetensi JF Pengelola PBJP Madya (Standar Kompetensi level-4).

Bagi Pengelola Fungsi PBJP yang bukan merupakan Pengelola PBJP juga tetap mengikuti Standar Kompetensi Personel lainnya (Unit Kompetensi Okupasi), yaitu:

1. Standar Kompetensi PPK;
2. Standar Kompetensi Pejabat Pengadaan;
3. Standar Kompetensi Pokja Pemilihan;
4. Standar Kompetensi Kepala UKPBJP; dan
5. Standar Kompetensi Pengelola LPSE.

Kepemilikan Kompetensi di bidang PBJP bagi PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pokja Pemilihan dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi, sedangkan kepemilikan Kompetensi bagi Kepala UKPBJP dan Pengelola LPSE dibuktikan dengan surat tanda tamat pelatihan teknis Kompetensi PBJP sesuai bidang tugasnya. Standar Kompetensi, baik bagi Pengelola PBJP maupun bagi personel lainnya secara detil pada gambar berikut.



Gambar 4. Standar Kompetensi

Dalam melaksanakan perancangan kebijakan PBJP, harus memiliki kompetensi untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan atau pembentukan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan pelatihan di bidang PBJP, sedangkan dalam melaksanakan pengembangan sistem PBJ harus memiliki Kompetensi dalam menganalisis pengembangan sistem PBJP yang selalu berkembang mengikuti kebutuhan K/L/PD.

PERANCANG KEBIJAKAN DAN SISTEM PBJ

Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ merupakan SDM yang melaksanakan perancangan kebijakan PBJP atau pengembangan sistem PBJ yang berkedudukan di LKPP dan di K/L/PD. Dalam melaksanakan perancangan kebijakan PBJP, harus memiliki kompetensi untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan atau pembentukan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan pelatihan di bidang PBJP, sedangkan dalam melaksanakan pengembangan sistem PBJ harus memiliki Kompetensi dalam menganalisis pengembangan sistem PBJP yang selalu berkembang mengikuti kebutuhan K/L/PD. LKPP memfasilitasi kegiatan pelatihan teknis/bimbingan teknis PBJ terhadap SDM Perancang Kebijakan PBJP dan SDM Pengembangan Sistem PBJ.

PENDUKUNG EKOSISTEM PBJ

Pendukung Ekosistem PBJ meliputi, namun tidak terbatas pada: Advokasi dan pendampingan PBJ, Probity Advisor, Mediator, Konsoliator, dan Arbiter pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak, Pemberi Keterangan Ahli (PKA), Anggota Dewan Sengketa Non Konstruksi, dan Anggota Dewan Sengketa Konstruksi. Pembinaan terhadap Anggota Dewan Sengketa Konstruksi dilakukan oleh Kementerian PUPR, sedangkan pembinaan terhadap SDM Pendukung Ekosistem PBJ lainnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangan.

UNIT KOMPETENSI OKUPASI

Pengelola Fungsi PBJP yang merupakan personel lainnya, perlu untuk mengikuti Standar Kompetensi Personel lainnya. Berikut dibahas Unit Kompetensi Okupasi pada PPK, Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan. Penjelasan/uraian mengenai Deskripsi Unit, Elemen Kompetensi, dan Kriteria Unjuk Kerja dari setiap Unit Kompetensi selengkapnya tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Unit Kompetensi Okupasi bagi Personel Lainnya

PPK PBJP	Pokja Pemilihan	Pejabat Pengadaan
Menyusun Spesifikasi Teknis	Menyusun Harga Perkiraan	Menyusun Harga Perkiraan
Menyusun Harga Perkiraan	Mengkaji Ulang Paket PBJP	Memilih Penyedia Barang/Jasa
Mengkaji Ulang Paket PBJP	Memilih Penyedia Barang/Jasa	Menyusun Dok. PBJP
Menyusun Rancangan Kontrak PBJP	Menyusun Dok. PBJP	Melakukan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa
Melakukan Evaluasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa	Melakukan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa	Menyampaikan Penjelasan Dokumen PBJP
Melakukan Finalisasi Dokumen Kontrak PBJP	Menyampaikan Penjelasan Dokumen PBJP	Mengevaluasi Dokumen Penawaran
Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak PBJP	Mengevaluasi Dokumen Penawaran	Melakukan Negosiasi
Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak PBJP	Melakukan Sanggahan	Mengelola Kinerja
Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak PBJP	Melakukan Negosiasi	Mengelola Risiko
Menyelesaikan Permasalahan Kontrak PBJP	Mengelola Kinerja	
Melakukan Penerimaan Hasil PBJP	Mengelola Risiko	
Melakukan Persiapan PBJP Secara Swakelola		
Melakukan Pelaksanaan PBJP Secara Swakelola		
Mengelola Kinerja		
Mengelola Risiko		

UJI KOMPETENSI

Di dalam pelaksanaan uji kompetensi, ada beberapa pihak yang bersamaan mendukung kesuksesan dari uji tersebut. Peserta Uji Kompetensi sebagai subyek dari uji Kompetensi diharapkan memahami SKKNI/SKJ, memahami Unit Kompetensi (SKKNI)/Jenis Kompetensi dan Komponen Kompetensi (SKJ) yang diujikan, dan memahami portofolio yang disampaikan. Pihak kedua adalah Pusklat yang memberikan pelatihan Kompetensi, kemudian Unit Kerja dalam peran memberi dukungan Anggaran dan memberi kesempatan untuk berkontribusi di seluruh bidang PBJP. Asesor Kompetensi berperan dalam mengatur pelaksanaan Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Mutu Sertifikasi Kompetensi PBJP, dan Tempat Uji Kompetensi dalam peran menyediakan tempat pelaksanaan Uji Kompetensi, mempromosikan Uji Kompetensi, dan mempersiapkan peserta dalam menghadapi uji Kompetensi. Sinergi yang diharapkan dalam suksesnya uji Kompetensi dapat dilihat dalam diagram berikut:



Gambar 5. Kunci Sukses Uji Kompetensi

UKPBJ SEBAGAI CENTRE OF EXCELLENCE

Semangat dalam mewujudkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai The Centre of Excellence (CoE) melalui diversifikasi tugas dan fungsi dari perencanaan hingga pengelolaan kegiatan, juga merupakan unit yang berfungsi melaksanakan PBJP di K/L/PD yang bersifat permanen dan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik melalui standar Kompetensi yang tercantum dalam SKKNI Kompetensi Pengelola PBJP. LKPP dalam mewujudkan terciptanya CoE tersebut menerbitkan Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

“
Empat fungsi UKPBJ yang diamanatkan dalam PerLKPP 10/2021 yakni Pelaksanaan fungsi pengelolaan PBJP, Pelaksanaan fungsi pengelolaan Layanan pengadaan secara elektronik, Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan PBJP, serta Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis PBJP meliputi bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi terkait.

UKPBJ adalah unit kerja di K/L/PD yang menjadi Pusat Keunggulan PBJ dan memiliki karakter Strategis, Kolaboratif, Berorientasi pada Kinerja, Proaktif, serta Mampu melakukan perbaikan berkelanjutan, sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia.

Empat fungsi UKPBJ yang diamanatkan dalam PerLKPP 10/2021 yakni Pelaksanaan fungsi pengelolaan PBJP, Pelaksanaan fungsi pengelolaan Layanan pengadaan secara elektronik, Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan PBJP, serta Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis PBJP meliputi bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi terkait.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ, Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan PA/KPA/PPK, membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan/menugaskan anggota Pokja Pemilihan, serta menugaskan Sumber Daya Pengelola Fungsi PBJ dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ. Jika PNS yang ditugaskan berkedudukan di luar UKPBJ, maka Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan pimpinan satuan kerja. Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Kepala UKPBJ.

Jika jumlah Pengelola PBJ di UKPBJ belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola PBJ, maka untuk :

- a. Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan Kepala UKPBJ menugaskan paling kurang 1 Pengelola PBJ dan kekurangannya dipenuhi dengan menugaskan PNS di UKPBJ/di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Sertifikat keahlian tingkat dasar/level 1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan; dan
- b. Pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan Kepala UKPBJ merekomendasikan PNS di UKPBJ/di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau Sertifikat keahlian tingkat dasar/level 1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan setelah menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

UKPBJ yang telah masuk dalam OTK BPK (disebut sebagai Bagian Pengadaan Barang/Jasa) dan diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan merupakan suatu kabar baik bagi pelaku pengadaan di BPK, terutama bagi Pengelola PBJ, karena merupakan wadah baru bagi dunia PBJ di BPK yang berfungsi sebagai CoE di lingkungan BPK.

KEWAJIBAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

Jumlah Pengelola PBJ yang telah dilantik di BPK per 01 Maret 2023 sebanyak 21 orang yang terdiri dari 2 Pengelola PBJ Ahli Madya, 6 Pengelola PBJ Ahli Muda, dan 13 orang Pengelola PBJ Ahli Pertama dan berkedudukan tidak di setiap satker, sepertinya menjadi tugas berat jika harus melaksanakan tugas jabatan PBJ di seluruh satker BPK (per 01 Maret 2023 data di <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap17/>

index/2023/LEMBAGA ada 3.023 paket dengan Total pagu 1.421.758 juta Rupiah dengan rincian 1.214 paket dan total pagu 320.045 juta Rupiah melalui cara Penyedia, 1.403 paket dan total pagu 1.045.446 juta Rupiah melalui cara Swakelola, serta 406 paket dan total pagu 56.266 juta Rupiah melalui Penyedia Dalam Swakelola) dan sewajarnya dibutuhkan personel lainnya yang melaksanakan sebagian tugas jabatan tersebut, namun apabila dibantu oleh personel lainnya (non Pengelola PBJ) maka personel tersebut diwajibkan memiliki Sertifikat Kompetensi level-1 dan Sertifikat Kompetensi Okupasi untuk dapat melaksanakan proses PBJ sesuai amanat dari Perpres 16/2018 dan perubahannya.

No	K/L/PPD	Penyedia		Swakelola		Penyedia dalam Swakelola		Total	
		Pkt	Pagu	Pkt	Pagu	Pkt	Pagu	Kep. Pkt	Total Pagu
11	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	194	279.230	7	3.641	0	0	201	282.871
12	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	345	179.687	430	270.634	42	83.218	817	733.54
13	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	40	26.754	1	5	0	0	41	26.75
14	Badan Pangan Nasional	4	11.937	69	54.063	177	15.751	250	81.75
15	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	48	32.688	0	0	0	0	48	32.68
16	Badan Pemeriksa Keuangan	1214	320.045	1403	1.045.446	406	56.266	3.023	1.421.75
17	Badan Penganggulangan Lumpur Sidoarjo	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2112	456.992	768	852.695	856	79.786	10.626	1.389.67
19	Badan Pengawas Pemilihan Umum	8633	1.453.937	3529	1.365.887	398	17.401	12.560	2.833.22
20	Badan Pengawas Tenaga NUKS	8	3.767	0	0	0	0	8	3.76

Gambar 6. Tangkap Layar RUP BPK pada SiRUP

Pasal II Ayat 1 Perpres 12/2021 menyatakan bahwa kewajiban memiliki Sertifikat Kompetensi untuk Personel Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74A ayat (6) dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023, dan di dalam Pasal 88 Perpres 16/2018 jelas mengamanatkan bahwa para PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang PBJ sepanjang belum memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang PBJ sampai dengan 31 Desember 2023. ~

Referensi

- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 70 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Pengadaan Barang/Jasa
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/rekap17/index/2023/LEMBAGA>



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perpustakaan Riset

JAM PELAYANAN
Senin-Jumat

**07.45
-
16.15**

**TERBUKA
UNTUK UMUM**

Koleksi produk-produk BPK yang
tidak dijumpai di perpustakaan lain



Gedung BPK RI Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat



**Desain
Ruangan
Menarik**



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)



1



3



2

1-4

Pimpinan BPK RI menghadiri Pertandingan Tenis Meja Antar-Kementerian/ Lembaga yang berlangsung di Auditorium BPK RI, 2 September 2023. Pertandingan ini diikuti oleh perwakilan dari 16 kementerian/ lembaga yaitu BPK RI, DPR RI, Setkab, Kemenlu RI, Kemensos RI, BPKP, BPS, BNPT, BNN, BKN, LAN, BSSN, BP2MI, BIG, BAKAMLA, dan BMKG.



4



5



6

5-6

Audiensi Ketua BPK RI Isma Yatun dengan para staf dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan pada 5 September 2023.

7

Ketua BPK RI Isma Yatun melakukan audiensi dengan Korwas Itama BPK, 13 September 2023.



7



8



10



11



12

8-12
Focus Group Discussion dan Rapat Konsultasi antara Pimpinan BPK RI dengan Komisi XI DPR RI berlangsung di Auditorium BPK RI, 27 September 2023.



9



13



14



15

13-15
Pengukuhan Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Pius Lustrilang sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Manajemen Pemerintah Daerah dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, dihadiri oleh Pimpinan BPK RI, 8 September 2023.



16

16-18
Uji coba dan cek fisik Kereta Cepat Jakarta-Bandung dihadiri Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Slamet Edy Purnomo dan Auditor Utama Keuangan Negara VII Novy G.A Pelenkahu, 19 September 2023.



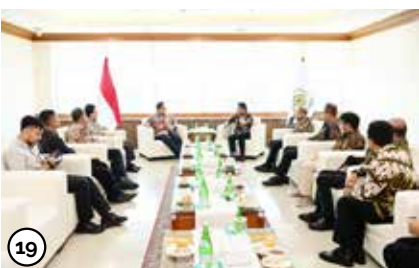
17



18

19
Courtesy meeting Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Slamet Edy Purnomo dengan Direksi Telkom dan Telkomsel, 12 September 2023.

20-21
Sekjen BPK Bahtiar Arif menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, 14 September 2023.



19



20



21



KUIS

Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 16 Agustus 2023, Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya kepercayaan internasional yang dimiliki Indonesia saat ini. Dia menyampaikan hal-hal yang dapat mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia.

Terkait hal tersebut, apa sajakah momentum yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dalam tiga tahun terakhir?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.

JAWABAN TERPILIH

Pertanyaan edisi sebelumnya:

Pada *Warta Pemeriksa* Edisi Juli 2023 disampaikan bahwa transisi energi telah menjadi agenda utama banyak negara, termasuk Indonesia. Terkait hal tersebut, apakah tantangan dalam menjalankan agenda tersebut?

Jawaban:

Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menjalankan agenda transisi energi salah satunya yaitu menjalankan transisi energi sambil memenuhi permintaan terhadap kebutuhan energi yang semakin meningkat.

PEMENANG

Nama:
Abdul Aziz

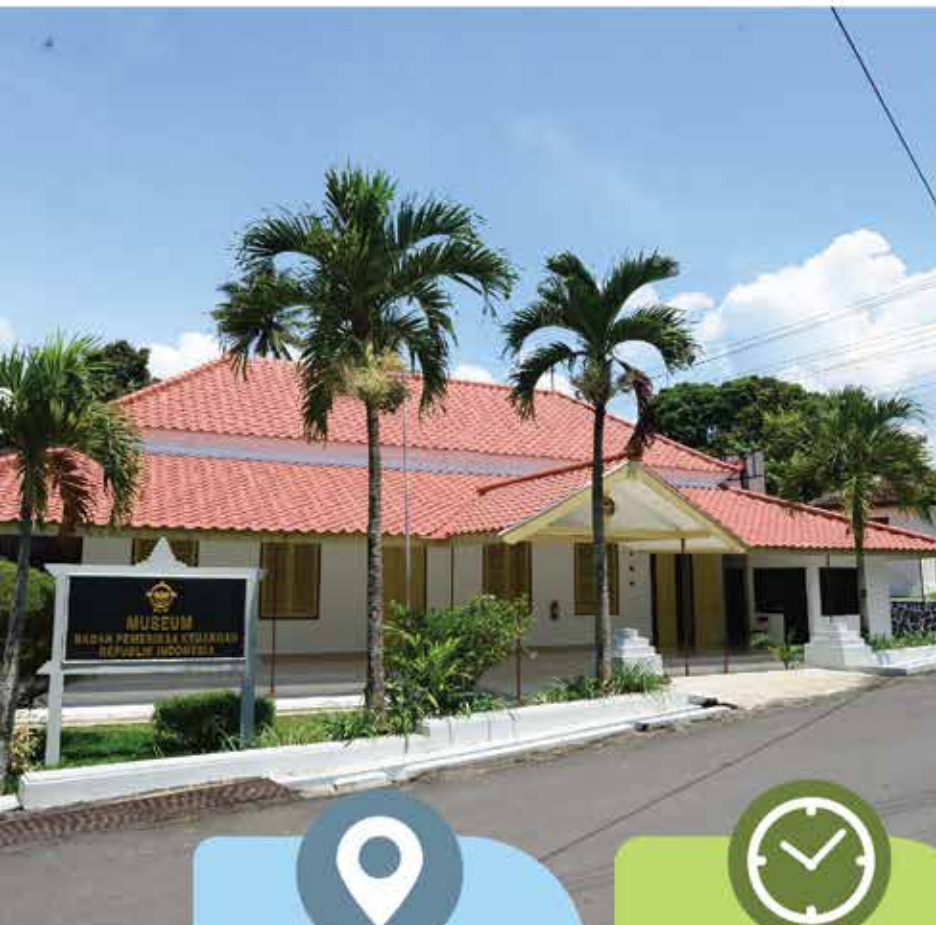
Instansi/Satuan Kerja:
**BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Tengah**



Museum BPK RI

Menghadirkan koleksi sejarah seputar BPK

**TERBUKA
UNTUK
UMUM
GRATIS!**



Alamat:

Jl. Diponegoro
No 1, Magelang



Buka:

Selasa - Minggu
09:00-15:00



(0293) 310230



museum.bpk.go.id



[museum_bpkri](https://www.instagram.com/museum_bpkri)

Wisata edukasi
di berbagai ruangan menarik



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



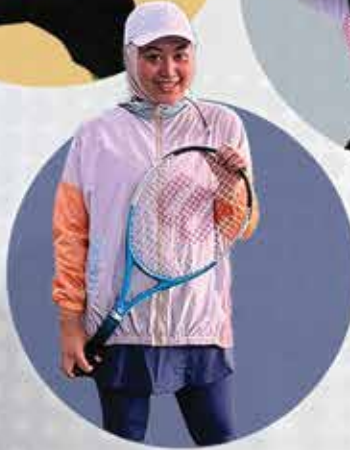
[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)



 **HAORNAS 2023**



HAORNAS 2023

**GELANGGANG
SEMANGAT PEMENANG**



www.bpk.go.id



@bpkriofficial



@bpkri



08111907010



BPK RI Official



@humasbpkri.official



@bpkri